BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, dimana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dengan demikian, hak asasi manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang sifatnya Universal dan langgeng oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain itu, hak asasi manusia juga memiliki kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, diuraikan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang HAM. Pada Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugrah-Nya

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dimana hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah) bahkan negara.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteran sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, amanatnya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejatraan umun. Namun, permasalahan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara merata, yang menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1). Selanjutnya, penyelenggaran

kesejahteraan sosial dalam (Pasal 3) bertujuan untuk (1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup; (2) memulikan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (4) meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat 2 menyatakan penyelenggaraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecatatan, keterpencilan, korban bencana dan kekerasan.

Diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksudkan diatas, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan sosial tersebut, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya baik perseorangan, keluarga, organisasi keamanan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha,

lembaga kesejahtraan sosial, maupun lembaga kesejatraan sosial asing demi terselengaranya kesejatraan sosial yang terarah terpadu dan berkelanjutan.

Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dengan maksud bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dengan ini, maka negara memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janiman sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan berdasarkan pada prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib dan amanat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bangsa, maka diperlukan suatu sistem percepatan penanggulangan kemiskinan, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010. Pada bagian ketentuan umum Perpres tersebut, menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan

pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Faktor utama dalam usaha pengentasan kemiskinan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu, kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; hambatan stuktural, Sumber Daya Manusia (SDM), rapunya kelembagaan dan faktor kultural dan lain sebagainya. Namun di lain sisi, program dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tidak berujung kepada peningkatan kesejahteraan serta upaya pemerintah maupun masyarakat sipil. Dalam mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan masih belum secara tajam memeriksa keberadaan hasil dan dampak terhadap penerima manfaat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 penduduk Kota Makassar Tahun 2014 berjumlah 1.429,2 ribu jiwa. Lebih lanjut BPS mengindentifikasi indikator kemiskinan untuk Kota Makassar Tahun 2012 sampai 2014. Data menunjukan bahwa, pada Tahun 2012 jumlah jiwa miskin 69,9 ribu orang atau 5,02 %, indeks kedalaman (P1) 0,76 dan keparahan (P2) 0,17. Pada Tahun 2013 jumlah jiwa miskin 66,40 ribu orang atau 4,70 %, indeks kedalaman (P1) 0,84 dan keparahan (P2) 0,24. Sedangkan pada tahun 2014, jiwa miskin di Kota Makassar berjumlah 64,23 ribu orang.

Berdasarkan data tersebut diatas maka perlu disadari bahwa jumlah tersebut relatif bukan sedikit. Dengan didasarkan pada hasil pengamatan langsung di kota Makassar, ditemukan komunitas-komunitas masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini menunjukan bahwa, masyarakat miskin tersebut kurang mendapatkan sentuhan bantuan dari pemerintah, terutama dalam hal bantuan sosial. Berdasarkan permasalahan diatas maka mendorong peneliti melakukan penelitian ini dengan judul *"Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin di Kota Makassar".*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan program kesejahteraan sosial pemerintah terhadap masyarakat miskin di Kota Makassar?
2. Apakah faktor determinan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kota Makassar?
3. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini diharapkan untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang:

1. Penerapan program kesejahteraan sosial pemerintah terhadap masyarakat miskin di Kota Makassar.
2. Faktor determinan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kota Makassar.
3. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoretis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoretis

a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penjamin hak-hak masyarakat miskin.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka pengambilan kebijakan tentang pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Indonesia.

c. Sebagai referensi bagi penelitian yang relevan berkaitan dengan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kota Makassar.

b. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan program jaminan kesejahteraan sosial di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga Negara. Lebih jelas, diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Darmodiharjo (1996: 96) berpendapat, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawah manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar bagi hak-hak dan kewajiban yang lain. Sedangkan, Muhtaj (2013: 14) berpendapat lain bahwa HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia sedangkan hak asasi melambangkan kemanunggalan hidup manusia dengan dimensi instrinsiknya.

Walaupun Muhtaj berpendapat bahwa, HAM berbeda dengan hak asasi dimana kedua konsep tersebut tidaklah sama. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok dimiliki manusia

sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu hak tersebut haruslah dilindungi, dijaga dan dihormati oleh siapapun demi kehormatan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya berbicara masalah hak, maka tidak mengabaikan apa itu kewajiban, kedua konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rustadi & Didi (1999: 82) bahwa Hak Asasi Manusia merupakan dasar bagi hak dan kewajiban lainnya, yang memberikan kesempatan pada manusia dapat berkembang sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Setiap warga Negara diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang diinginkan, itulah hak. Namun dalam memenuhi hak tersebut tidaklah mengabaikan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam mengembangkan harkat dan martabat manusia maka dibutukan suatu ideologi yang jelas. Sejalan dengan pendapat Cassese (2005: xxii) bahwa Hak-hak Asasi Manusia adalah suatu "Galaxy" Ideologis dan normatif yang berkembang dengan cepat, dengan suatu tujuan khusus menambah jaminan bagi martabat pribadi. Berbicara masalah ideologi dan aturan, maka itu merupakan tanggung jawab pemerintah dan negara.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang Hak Asasi Manusi (HAM), dapat disimpulkan bahwa setiap pendapat berbeda namun pada dasarnya HAM adalah hak kodrati atau hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sampai meninggal diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan diberikan oleh siapapun. Untuk itu, hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Pasca perang Dunia II, masyarakat Internasional jatuh pada kesimpulan untuk segera mengambil langka-langka strategi dalam mengusung dunia yang lebih beradap. Manfred Nowak menegaskan, sekalipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diakui sebagai hukum Internasional yang tidak mengikat, namun DUHAM merupakan penafsiran otoritatif tentang istilah HAM dalam piagam PBB.

Selain DUHEM (1948), Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik (1966) dan Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (1966), beberapa instrument pokok lainnya juga muncul. Kesemua ini memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak asasi manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang.

Lebih dari itu, instrument Internasional ini kemudian dekenal sebagai "Undang-undang" HAM (*Internasional Bill of Human Rights*) yang diyakini sebagai standar dan menjadi parameter penegakan hukum HAM di dunia. Hukum HAM Internasional terdiri dari kumpulan aturan, prosedur, dan Lembaga-lembaga Internasional yang dikembangkan untuk melaksanakan konsep ini dan memajukan penghormatan terhadap HAM disemua negara diseluruh dunia.

Dalam *The Universal Declaration of Human Rights* PBB Tahun 1948 sesuai dengan konteks ruang dan zaman maka secara garis besar perkembangan

HAM dibagi dalam empat generasi. Generasi pertama berpendapat bahwa, pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politk. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.

Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan Hak Asasi Manusia. Pada generasi kedua ini lahir dua *convenant* yaitu *Internasional Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights* dan *Internasional, Convenan on Civil and Political Rights*. Kedua *convenant* tersebut disepakati dalam sidang umum PBB 1966. Pada masa generasi kedua hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi dan hak politik.

Selanjutnya lahir generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak, akonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Rights of Development*) sebagai istilah yang diberikan oleh *International Commission of Justice*. Dalam pelaksanaannya dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena hak-hak rakyat lainnya dilanggar. Kalau kata pembangunan tetap dipertahankan, maka pembangunan

tersebut haruslah berpihak kepada rakyat dan diarahkan kepada retribusi kekayaan nasional serta redistribusi sumber-sumber daya sosial, ekonomi, hukum, politik dan budaya secara merata. Keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bahkan setelah pembangunan itu selesai. Agaklah pepetah kuno *Justice Deleyed Justice Deny* tetap berlaku untuk kita semua.

Setelah banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemikiran HAM generasi ketiga, lahirlah generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak didasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipolopori oleh Negara-negara dikawasan Asia yang pada Tahun 1983 melahirkan Deklarasi HAM yang disebut *Declaration of Basic Duties of Asia People and Government*. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada tatanan sosial yang berkeadilan. Selain itu, Deklarasi HAM Asia telah berbicara mengenai masalah "Keajaiban Asasi" bukan hanya hak asasi". Deklarasi tersebut juga secara positif mengukukan keharusan impratif dari Negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya.

3. Macam-macam Hak Asasi Manusia di Indonesia

a. HAM dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada alinea pertama dinyatakan; bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan pengakuan peri kamanusiaan adalah inti sari dari hak asasi manusia dan pengakuan peri keadilan adalah inti sari negara-negara hukum, sedangkan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1 menyatakan bahwa "sekalian orang dilahirkan merdeka".

Pada alinea kedua dinyatakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai negara yang adil, yang mana kata sifat adil sebagai tujuan dari hukum yang berindikasi kepada negara hukum. Hal ini seiring dengan Deklarasi PBB pada Pasal 10 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenunya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak".

Pada alinea ketiga, rakyat Indonesia berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Seiring dengan pasal 27 Deklarasi PBB menyatakan "setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat".

Sedangakan pada alinea keempat, pengakuan bahwa membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan dasar negara sila ke lima yang berbunyi " mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA (Pasal 28A-28J). HAM tersebut dapat dibagi dalam beberapa aspek antara lain:

1) HAM berkaitan dengan hidup dam kehidupan;
2) HAM berkaitan dengan keluarga;
3) HAM berkaitan dengan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4) HAM berkaitan dengan pekerjaan;
5) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
6) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
7) HAM berkaitan dengan rasa aman dan pelindungan dari perlakuan yang merendakan derajat dan martabat manusia;
8) HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
9) HAM berkaitan dengan persamaaan dan keadilan;
10) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

b. HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999

Macam-macam Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Bab III antara lain:

1) Hak untuk hidup;

2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3) Hak mengembangkan diri;
4) Hak meperoleh keadilan;
5) Hak atas kebebasan pribadi;
6) Hak atas rasa aman;
7) Hak atas kesejahteraan;
8) Hak turut serta dalam pemerintahan;
9) Hak wanita;
10) Hak anak.

c. HAM Lainnya

Dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) HAM dapat dikategorikan dalam dua kelompok, sebagaimana yang dikemukakan dalam Alif (2007: 65-67) antara lain:

1) *Civil and Political Rights*, meliputi
   a) Hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan (*The Rights to Life, Liberty, and Security of Person*);
   b) Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (*Freedom from Slavery and Servitude)*;
   c) Bebas dari penganiyayaan yang kejam, tidak berkemanusiaan atau bersifat merendakan atau menghina (*Freedom from Terture and Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*);
   d) Hak atas pengakuan sebagai manusia pribadi dihadapan hukum (*The Rights to Recognition as a Person Before the Law);*

e) Semua orang sana dihadapan hukum (*Egual Before the Law)* dan berhak mendapat perlindungan hukum *(Egual Proterction of The Law*)

2) *Economic, Social, and Culture Rights*, meliputi

a) Hak atas jaminan sosial *(The Right to Social Security*);

b) Hak atas pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan yang sama (*The Right to Work and Free Choice of Employment);*

c) Hak mendapat upah yang sama untuk pekerjaan yang sama (*Eguel Pay Eguel Work);*

d) Hak atas pengapuhan yang adil dan baik untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia (*The Rights To Jast and Favourable Remuneration Insuring an Existence Worthy of Human Dignity)*;

e) Hak mendirikan dan memasuki serikat kerja (*Rights To From and Join Trade Unions).*

Selain pembagian HAM diatas, ada pula pendapat lain menurut Bertens (2005: 184) pembagian hak-hak untuk hak moral maupun untuk hak legal antara lain: (1) Hak khusus dan hak umun; (2) Hak positif dan hak negatif; (3) Hak individual dan hak sosial.

Sedangkan, Darmadiharjo (1996: 96) dalam bukunya dengan judul pancasila suatu orientasi singkat, membedakan hak-hak asasi sebagai berikut :

1. Hak-hak asasi pribadi atau *Personal Rights* yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau *Property Rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu member dan menjualnya, serta memanfaatkanya.
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut *Rights of Logal Quality*.
4. Hak-hak asasi politik atau *Political Rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *Social and Culture Rights* misalnya, hak untuk memiliki pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara perlindungan atau *Procedural Rights*, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Dengan demikian maka dapat di simpulkan bahwa hak asasi di bagi dalam dua bagian besar yaitu hak khusus dan hak umum. Hak khusus terdiri dari; hak hidup, hak berkeluarga, hak kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak anak dan hak wanita. Sedangkan hak umum terdiri dari, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak berbudaya.

B. Kesejahteraan Sosial

1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-undang No 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1).

Notowidagdo (2016: 36) berpendapat bahwa sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Sedangkan Arthur Dunham dalam (Notowidagdo 2016: 37) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu bidang usaha kemanusiaan yang luas dan mencakup jenis-jenis badan organisasi, serta macam-macam pelayanan. Dengan demikian maka, kesejahteraan sosial dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial, melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesejahteraan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial.

Selanjutnya, kesejahteraan sosial bukan hanya dinilai dari kondisi batiniah namun juga dari lahiriah seperti yang dikemukanan oleh Maftuchan dkk (2016: xxv) bahwa kesejahteraan seringkali dimaknai sebagai kondisi taraf hidup warga negara yang dapat diukur secara ekonomi. Dimana, dalam pendekatan teori ekonomi pembangunan konvensional, ukuran tersebut merupakan ukuran nilai

Produk Domestik Bruto (semua barang dan jasa yang di produk dalam satu tahun) dibagi dengan jumlah penduduk (Dawam, 2016: xx).

Khomsan (2015: 63) sependapat dengan Rohiman bahwa kesejahteraan diukur dari kondisi batiniah. Yakni, kesejahteraan adalah perasaan terhadap pemunuhan kebutuhan fisik, rasa aman dan tentram, dicintai dan disayang, rasa dihargai, dan aktualisasi diri. Namum perlu dibedakan antara Kesejahteraan sosial dengan sejahtera. Di Amerika Serikat, *sejahtera* kadangkala dianggap sinonim dengan penyediaan bantuan finansial dalam bentuk jaminan sosial. Sedangkan kesejahteraan sosial itu dapat dihubungkan dengan pelayanan kerja sosial.

Selain itu, menurut Suharto (2014: 2) kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi dasar yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu keguatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial dan ekonomi warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya serta merasa aman, sentosa dan makmur, dicintai dan disayang, rasa dihargai, dan aktualisasi diri dan selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya).

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Asuransi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Lebih rinci dalam Bab III UU RI Nomor 11 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Rehabilitasi (Pasal 7) Menyatakan:
    1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulikan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
    2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti asuhan.
b. Jaminan sosial (Pasal 9) Menyatakan:
    1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk
        a) Menjamin anak fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;

b) Menghargai perjuangan perintis kemerdekaan, dan keluarga phalawan atas jasa-jasanya.

2) Jaminan sosial sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) diberikan dalam bentuk asuransi kesejatraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

c. Asuransi (Pasal 10) menyatakan:

1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya;

2) Asuransi keesejatraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.

d. Pemberdayaan sosial (Pasal 12) Menyatakan:

1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk

a) Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;

b) Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejatraan sosial.

2) Pemberdayaan sosial sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dilakukan melalui:

a) Peningkatan kemauan dan kemampuan;

b) Penggalian potensi dan sumber daya;

c) Penggalian nilai-nilai dasar;

d) Pemberian akses dan ;

e) Pemberian bantuan usaha.

e. Perlindungan sosial (Pasal 14) Menyatakan:

1) Perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, sosial, kelompok, dan atau masyarakat atau kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;

2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui :

a) Bantuan sosial;

b) Advokasi sosial;

c) Bantua hukum.

f. Bantuan sosial (Pasal 15) Menyatakan:

1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar;

2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat sementara dan bersifat berkelanjutan dalam bentuk :

a) Bantuan langsung;

b) Penyediaan aksessibilitas dan penguatan kelembagaan.

C. Teori Kemiskinan

1. Konsep Kemiskinan dan Masyarakat Miskin

Kata fakir miskin yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 mempunyai pengertian yang berbeda. Oleh karena itu perkataan fakir miskin tidak dapat dipahami sebagai satu kesatuan konsep. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab dengan pengertian berbeda. Kata *fakir* berarti orang yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan *miskin* artinya orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi dirinya sendiri. Selain itu fakir miskin (Depsos, 2001) adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Mattulada (1997: 131) bahwa, miskin itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang yang hidup dalam kekukurangan dalam memenuhi keperluan materi benda yang diperlukan untuk menyambung hidupnya.

Menurut Sumodinigrat (1998: 26) Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, yakni apek sosial, ekonomi, dan budaya. Disini kita ketahui bahwa kemiskinan ditandai dengan adanya kesenjangan sosial. Suatu keadaan yang menunjukan adanya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakmampuan suatu wilayah atau daerah untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk

yang berlebihan dengan persediaan antar sumber daya. Sedangkan, secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya BPS dan Depsos (2002: 3-4) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak yakni, sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*Poverty Line*) atau batas kemiskinan (*Poverty Threshold*). Selain itu BPS dan Depsos menyatakan bahwa garis kemiskinan adalah sejumlah Rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan memiliki banyak defenisi. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari perspektif subyektif dan koparatif, sedangkan yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Meskipun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi namun, menurut Suharto (2014: 15) kemiskinan sejatilah menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, instutisional, dan stuktural. Sedangkan Soerjono (2006: 320) mengartikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Khomson, Dkk (2015:11) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Namun, Wahid (2014 : 29) mendefinisikan kemiskinan tak hanya terpaku pada persoalan ekonomi saja, tetapi merambah kepada berbagai dimensi, seperti sosial, politik dan budaya. Kemiskinan pertama- tama lebih sering ditempatkan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan sumber daya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dasar, seperti sandang, papan dan pangan. Selain itu, pendapat lain menurut Hall dan Midgley dalam (Wahid 2014: 30) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya di dalam masyarakat.

Pada umumnya sumber dari kemiskinan adalah sruktur yang tidak adil dan ulah kelas sosial yang berkuasa, yang sering kali karena kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya kemudian mengeksplorasi masyarakat miskin. Kemiskinan itu disebut kemiskinan stuktural. Menurut Soemardjan dalam (Narwoko 2007: 179) kemiskinan stuktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena stuktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Sedangkan Kartasasmita dalam (Setiadi 2011:803) menyebutkan "*Accidental Poverty"* yaitu kemiskinan karena dampak dari kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Setiadi (2011: 792) kemiskinan dipahami dalam berbagai cara antara lain: (1) gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan layanan dasar, (2) gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hak ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini menyangkut masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi, (3) gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Berdasarkan berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak serta berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk sandang, pangan maupun papan. Selain itu, kemiskinan dilihat juga dari kondisi politik, sosial, budaya dan stuktural.

Berbicara masalah kemiskinan maka itu tidak terlepas dari masyarakat. Hal ini disebabkan karna kategori miskin tidak berlaku bagi makluk lain. Dalam kehidupan manusia sering kita temukan ragam yang berbeda. Ada masyarakat yang miskin dan ada pula yang kaya, ada yang sejahtera ada pula yang kurang sejahtera. Dengan demikian maka miskin itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang yang hidup dalam kekukurangan dalam memenuhi keperluan materi benda yang diperlukan untuk menyambung hidupnya.

Menurut Yunan (2015: 9) masyarakat miskin adalah mereka yang serba kurang mampu dan terbelit didalam lingkaran ketidakberdayaan, rendanya pendapatan mengakibatkan rendanya pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produktifitas. Ketidakberdayaan ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat miskin adalah kelompok orang yang hidup dalam serba kekurangan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bentuk materi (Lahiriah) maupun moril (Batiniah) yang diperlukan untuk menyambung hidupnya. Kekurangan tersebut berupa sandang, pangan dan papan serta rasa batiniah yang belum aman, sejahtera, dan sentosa.

2. Dimensi dan Indikator Kemiskinan

David Cox dalam Adi (2003: 56) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengkalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses

pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).

c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
d. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar simiskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Selanjutnya, menurut Anwas (2014: 84) kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan stuktural, dan kemiskinan kultural. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemiskinan *absolut* merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum melaui pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
b. Kemiskinan *relatif* adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi dimana pendapatannya berada pada posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat sekitarnya.
c. Kemiskinan *stuktural* adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan.

d. Kemiskinan *kultural* terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang desebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.

Selain itu, menurut Rukminto (2015: 4-5) orang miskin dapat dikelompokan menjadi tiga bagian antara lain:

a. Orang-orang miskin yang kondisi fisiknya masih kuat. Kelompok ini, biasanya adalah pengemis yang masih bertubuh kuat.
b. Orang miskin yang kondisi fisiknya buruk. Seperti para lansia (lanjut usia), tuna netra (buta), tuna rungu (tuli), para ibu dengan anaknya yang masih kecil dan mereka yang menderita cacat fisik ataupun mental.
c. Anak-anak yang masih tergantung pada orang yang lebih mapan (*Dependent Chilren*). Mereka, antara lain adalah anak-anak yatim-piatu, bayi yang diterlantarkan, atau anak-anak yang orang tuanya sudah sangat miskin sehingga tidak mampu membiayai anak-anaknya.

Ciri-ciri Kemiskinan menurut Suharto (2009: 132) menyebutkan ada sembilan ciri-ciri kemiskinan, yaitu:

a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
b. Tidak ada akses terhadap kebutuhan dasar;
c. Tidak ada jaminan masa depan;
d. Rentan terhadap kegoncangan, baik individual maupun massa;
e. Rendahnya SDM;
f. Tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat;

g. Tidak akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan;
h. Tidak mampu berusaha karena kecacatan, fisik maupun mental;
i. Ketidakmampuan dan ketidakberfungsian sosial.

Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima bagian menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Khomson (2015:14-15) adalah:

a. Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin), adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu Indikator tahapan keluarga sejahtera I.
b. Keluarga Sejahtera I (miskin), adalah keluarga yang baru dapat memenuhi Indikator-indikator berikut:
    1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
    2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
    3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik;
    4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawah kesarana kesehatan;
    5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana kontrasepsi;
    6) Semua anak umur 7-15 Tahun dalam keluarga bersekolah.
c. Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I (Indikator 1-6) dan Indikator berikut:

7) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
8) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur;
9) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun;
10) Luas lantai rumah paling kurang 8 m^2 untuk setiap penghuni rumah;
11) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing;
12) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
13) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 Tahun bisa baca tulisan latin;
14) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

d. Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang sudah memenihi indikator tahapan keluarga sejahtera I dan II (Indikator 1-14) dan Indikator berikut:
15) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
16) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;

17) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi;
18) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal;
19) Keluarga memperoleh informasi dari Surat Khabar/ Majalah/Radio/TV.

e. Keluarga Sejahtera III plus, adalah keluarga yang memenuhi indicator keluarga Sejahtera I, II dan III (Indikator 1-19) dan Indikator berikut:
20) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan meteriil untuk kegiatan sosial;
21) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Sedangkan, ukuran kemiskinan oleh BKKBN yang menggunakan data mikro, sebuah keluarga disebut miskin jika : (1) tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban rutin dalam agamanya; (2) tidak bisa makan dua kali dalam sehari; (3) tidak mempunyai pakaiaan lain untuk bekerja bersekolah dan melakukan aktifitas lainnya; (4) tinggal di rumah yang sebagian besar ruangannya berlantai tanah; (5) tidak bisa membayar biaya fasilitas kesehatan.

3. Penyebab Kemiskinan

Masalah kemiskinan terjadi bukan hanya begitu saja, namun dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Suharto (2009: 17) kemiskinan diakibatkan oleh empat faktor antara lain :

a. Faktor Individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis simiskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari simiskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.
b. Faktor Sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga simiskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
c. Faktor Kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep "kemiskinan kultural" atau "budaya kemiskinan" yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas.
d. Faktor Stuktural. Menunjuk pada stuktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *Accessible* sehingga menyebabkan orang atau sekelompok orang menjadi miskin.

Selanjutnya, penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia 2003 dalam (Khonsan 2015 : 17) adalah :

a. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
b. Keterbatasan ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;

d. Adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (Ekonomi Tradisional vs Ekonomi Modern);
f. Rendanya produktifitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
h. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance)*;
i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Selain itu, Nasdian (2015: 101) menegaskan bahwa meskipun program pengembangan masyarakat berpotensi memberdayakan masyarakat lapisan bawah, tetapi potensinya tidak dapat diaktualisasikan dengan masalah stuktural. Malasah stuktural tersebut mengalakan masyarakat lapisan bahwa terhadap interes pribadi aparatur pemerintah yang lebih kuat. Selain itu mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta koordinasi antar lembaga juga belum berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya pemerintah lokal terjebak dalam perancangan program pengembangan masyarakat yang kaku.

Depdikbud (1999: 33-14) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga sejahtera antara lain:

a. Persepsi, sebagai suatu cara pandang masyarakat sebagai suatu obyek berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran secara langsung maupun tidak langsung.
b. Tingkat pedidikan masyarakat juga merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat, hal ini dapat dimengerti bahwa tingkat pendidikan secara tidak langsung menunjukan tingkat waawasan masyarakat terhadap dunia sekitarnya.
c. Faktor sosial, mempengaruhi masyarakat dalam menilai terhadap tingkat kepentingan. Unsur-unsur yang terdapat dalam keluarga sejahterah (kemampuan keluarga untuk menyediakan kebutuhan materi baik prima/ sekunder, kebahagiaan lahir batin, tingkat keterbukaan, dan kerjasama dalam keluarga, sikap *nrimo*, dan kondisi kesehatan dan gizi keluarga.

Mattulada dalam bukunya "Sketsa Pemikiran tentang Kebudayaan, Kemanusiaan, dalam Lingkungan Hidup" (1997: 131-132) menjelaskan penyebab kemiskinan secara garis besar antara lain:

a. Sebab kemalasan, kebodohan, ketidakmampuan fisik atau mental (cacat), dan penyebab dari dalam kemampuan pribadi seseorang.
b. Sebab truktural, yakni terjadinya kemiskinan karena kelemahan atau kebobrokan stuktural, yang berada di luar kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghindari atau mengatasinya. Misalnya kekuasaan pemerintahan yang memiliki kekuasaan paksa dimana sering terjadi penyalagunaan kekuasaan seperti korupsi.

c. Sebab kultural, inilah yang tumbuh dari satu sistem nilai budaya yang menghargai cara-cara kehidupan yang menghindari kesenangan hidup duniawi. Orang atau kelompok mengamalkan faham seperti ini, menghindari dari tekanan hidup duniawi, dan memilih kehidupan sepih, mengingat mengutamakan kehidupan rohaniah.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan dikemukakan oleh Todaro (1997) dalam (Wahid 2014 : 42) antara lain perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, perbedaan kekayaan, sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia, perbedaan peranan sektor swasta dan negara, perbedaan stuktur industri, dan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi politik negara lain serta perbedaan pembagian kakuasaan, stuktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Lebih jelas dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2009, Bab IV tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada:

a. Pasal 20 Menyatakan: Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

1) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

2) Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
3) Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan dan;
4) Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

b. Pasal 21 Menyatakan: Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk :
1) Penyuluhan dan bimbingan sosial;
2) Pelayanan sosial;
3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
4) Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
5) Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
6) Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman dan/ atau;
7) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Sedangkan, dalam Bab III Perpres No 15 Tahun 2010 mengatur tentang Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 3 Menyatakan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
1) Mengurangi beban penggeluaran masyarakat miskin;

2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

b. Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 4 Menyatakan, Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5 Menyatakan:

1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
   a) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
   b) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan meperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
   c) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
   d) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

2) Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari;
   a) Kementrian/ lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan;
   b) Organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga Internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

c. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 6 Menyatakan:

1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinerjikan kegiatan penanggulangan kemiskinan diberbagai kementrian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya;
2) Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 7 Menyatakan:

Dengan peraturan presiden ini dibentuk tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8 Menyatakan:

Tim penanggulangan kemiskinan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pasal 9 Menyatakan:

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertugas:

1) Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
2) Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinandi kementrian atau lembaga;
3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 10 Menyatakan:

Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Lukman Sutrisno dalam (Soleh 2014: 74) berpendapat bahwa, model pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan antara lain :

a. Pemerintah dan pihak luar (LSM) dalam menggunakan model pemberdayaan harus mengarahkan pada proses tranformasi hubungan antara kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik di wilayah yang bersangkutan.
b. Model pemberdayaan mensyaratkan pula penghapusan pendekatan masa mengambang seperti yang terjadi pada masa orde baru. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi rakyat dalam membangun kehidupan politik pedesaan.
c. Model pemberdayaan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila digerakan atau ditulang-punggungi oleh kelas intelektual desa.

d. Pembangunan masyarakat pedesaan hanya akan efektif apabila desa mampu mengaktualisasiakan modal yang dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

Sedangkan, Wibisono (2016: 28) menjelaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan Era Orde baru secara umum bergantung pada kebijakan ekonomi makro yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas harga. Sedangkan kebijakan spesifik yang berupaya menurunkan kemiskinan terlihat bersifat pragmatis. Sementara Bank Dunia mengidentifikasi empat strategi terpenting untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas, prioritas dan efisiensi pengeluaran publik, jaring pengaman sosial yang efektif dan birokrasi yang responsif.

D. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan semakin popular dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realita individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah. Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan dan kemiskinan.

Dengan demikian maka muncul berbagai konsep tentang pemberdayaan itu. Menurut Suharto (2014: 59) pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan:

a. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-undividu yang mengalami masalah kemiskinan.
b. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasul yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi , mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Sedangkan, menurut Parsons dalam (Suharto 2014: 59) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Soleh (2014:122) pemberdayaan sebagai sebuah model pembengunan diartikan sebagai serangkaian upaya meningkatkan daya atau kemampuan mereka yang berada dalam posisi tidak berdaya, agar dengan tambahan kedayahan atau kemampuan tersebut dapat keluar dari belenggu kemiskinan.

Menurut Anwar (2014: 49) pemberdayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan yang dimaksud Anwar adalah mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Selain itu, Djohoni (2013) dalam Anwar berpendapat bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan.

Pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan, kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan juga tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Perberdayaan mengandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan perberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kegiatan perberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan

yang dapat mendorong kemampuan dan ketrampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, serta mengubah *mind set* masyarakat untuk berdaya dan mandiri.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat.

Menurut Suharto (2005) dalam (Anwar, 2014:87) penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat cultural dan srtuktur yang menghambat.
b. Penguatan; memperkuat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya

persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

d. Penyokongan; pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.
e. Pemeliharaan; pemeliharaan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Menurut Suharto (2014:66) dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu:

a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap kliem secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih kliem dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok kliem. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap kliem agar memiliki kemampuan memecahkan permaslahan yang dihadapinya.
c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial,

lobbying, pengorganisasian masyarakat, menajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam model ini.

Chin dan Benne dalam (Nasdian 2015: 60) memperkenalkan tiga strategi perencanaan dan aksi pembangunan masyarakat. Perencanaan dan aksi tersebut dilaksanakan melalui (1) Modifikasi pola sikap dan perilaku dengan pendidikan dan aksi lainnya; (2) Mengubah kondisi sosial dengan mengubah kebijakan-kebijakan organisasi formal; atau (3) Reformasi peraturan dan sistem fungsional suatu masyarakat.

Dubois dan Miley dalam (Suharto 2014: 68) memberikan beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

a. Membangun relasi pertolongan yang: (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri; (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerja sama klien.
b. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga kebersihan klien.
c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien: (3) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan kliem dalam penbuatan keputusan dan evaluasi.

d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui; (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembangan professional, riset, dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakseteraan kesempatan.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang mendukung dalam kajian ini antara lain; yang dilakukan M. Yakob Surung (2011: 61) yang menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan kemiskinan para petani padi sawah adalah (a) faktor lahan, (b) faktor pengadaan atau distribusi pupuk/ benih, (c) faktor produktifitas dan teknologi tani, dan (d) faktor hasil panen dan kualitas hasil panen. Yakob menegaskan bahwa kererbatasan/ penghasilan para petani sebagai penyakap dan buruh tani menyebabkan keadaan ekonomi rumah tangga para petani tidak stabil, atau cenderung kekurangan sehingga petani melakukan aktifitas kerja sampingan.

Menurut Nur Adna (2013: 112) kemiskinan lebih dominan dihubungkan dengan penyebab individu atau patalogis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku pilihan dan kemampuan dari sisi orang miskin itu sendiri. Karena kepercayaan dirinya rendah, apatis hannya menerima nasib, tidak memiliki impian masa depan, sikap dan perilaku kerja masyarakat sulit untuk berkembang dan masih bersifat manual karena tidak didukung oleh alat teknologi modal usaha bahkan motivasi masyarakat juga dipengaruhi dari kurangnnya perhatian

pemerintah setempat, yang diberikan terkesan hanya sekadar melaksanakan kegiatan tetapi tidak ada tindak lanjut.

Sedangkan, Yuyun (2015: 90) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat petani sawah dalam mengatasi kemiskinan adalah:

1. Bantuan pemerintah belum maksimal yakni kurangnya perhatian dan monitoring;
2. Teknologi pengelolaan sawah belum merujuk kearah modern atau petani masih menggunakan cara tradisional dalam mengelola sawah;
3. Faktor budaya masyarakat, kebiasaan serta sikap masyarakat yang belum mangalami perubahan, cenderung menyerah pada nasib, atau tidak mempunyai daya juang serta tidak mempunyai orientasi masa depan.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah, Yakob mengkaji tentang kemiskinan yang terjadi pada petani padi sawah. Nur Adna meneliti tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Yunan meneliti tentang kemiskinan yang terjadi pada masyarakat tani. Sedangkan penelitian ini lebih menganalisis tentang program-program pemerintah dalam memenuhi hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

F. Kerangka Konseptual

Hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir yang diberikan dari Tuhan. Untuk itu, hak tersebut harus dilindungi, dihormati dan dijaga oleh pemerintah, negara dan siapapun. Sedangkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk itu maka, Kesejahteraan sosial merupakan salah satu hak dari manusia dimana, setiap orang menghendaki agar selalu merasa damai, aman dan sejahtera dalam kehidupan setiap hari.

Perlu disadari sungguh bahwa masalah kesejahteraan sosial selalu melanda masyarakat miskin atau tidak mampu. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, baik secara internal maupun eksternal. Banyak program-program sosial yang telah direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, usaha tersebut belum terealisasi secara merata, hal ini disebabkan karena sistem yang kurang baik dalam pelaksanaan program tersebut.

Program Jaminan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu sistem yang dikalukan negara dan pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat, seperti yang telah diamanahkan dalam Undang–undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Perundang-undangan negara lainnya. Pemerintah dan pemerintah daerah merupakan peran utama atau aktor dari sistem perencanaan kesejahteraan rakyat tersebut. Untuk itu, sistem yang di bangun haruslah terprogram dan terlaksana

dengan sebaik-baiknya, serta diperlukan adanya kerja sama yang baik antara semua instansi terkait.

Selain itu, program yang dilakukan oleh Sistem Jaminan Sosial adalah pemberdayaan masyarakat, yang menjadi prioritas adalah masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Dimana hak-hak mereka sebagai warga negara harus dipenuhi seperti yang dijanjikan. Namun, kenyataannya masih terdapat masyarakat yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara baik dan merata baik secara fisik maupun non fisik. Untuk itu, perlu di bangun suatu srategi yang terarah demi mensejahtrakan rakyat. Dengan alasan yang kuat bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan itu. Untuk lebih jelas secara skematis kerangka pikir di gambarkan sebagai berikut:

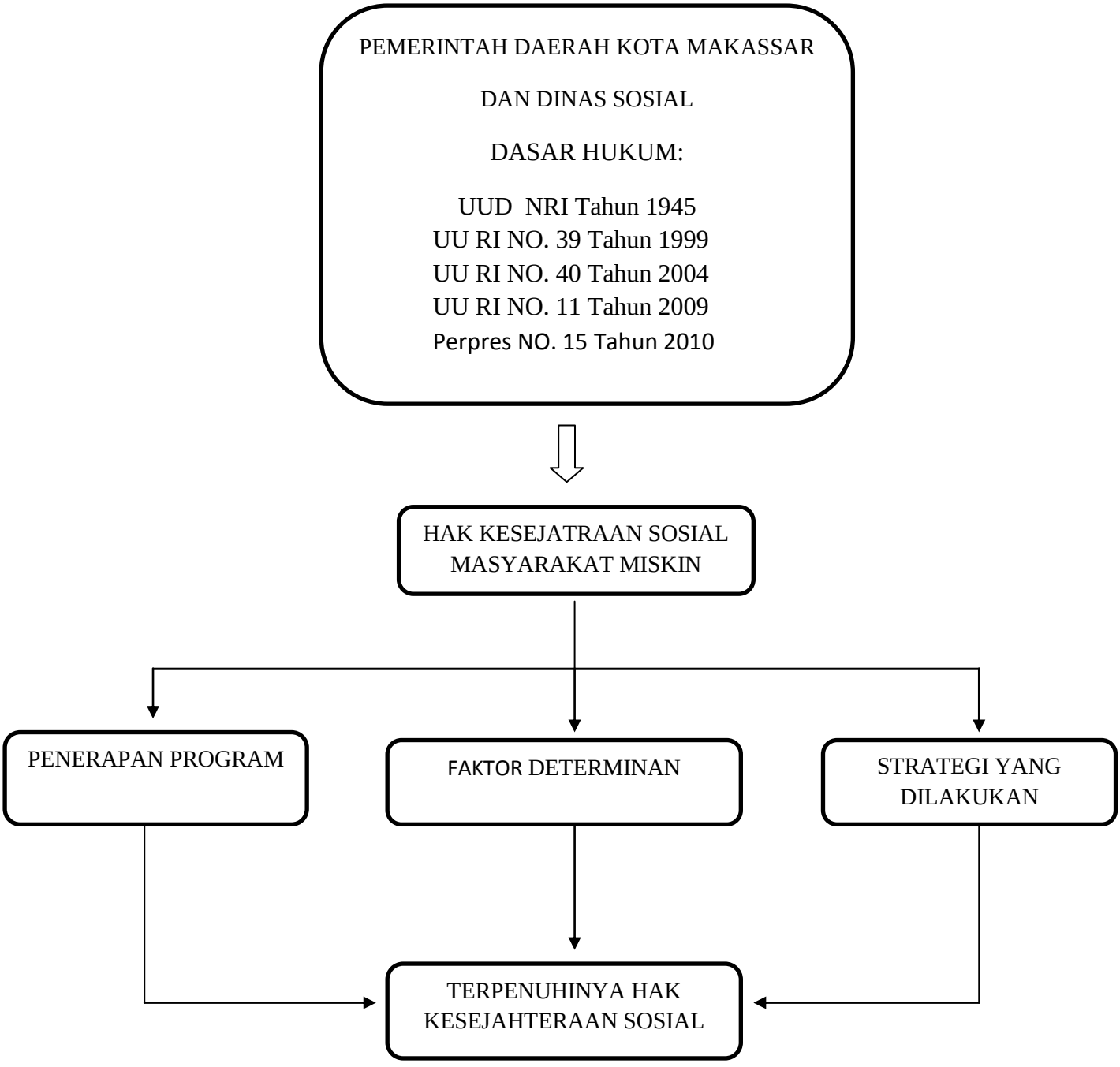

2.1 Bagan Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Ada berapa tempat yang menjadi lokasi dimana peneliti melakukan penelitian yaitu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Manggala, Kelurahan Tamanggapa, Jalan AMD. Borong Jambu kota Makassar. Dengan alasan bahwa penduduk yang berdomisili di lokasi tersebut masih banyak tergolong miskin. Selain itu, Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, dengan alasan bahwa Dinas Sosial sebagai penyelenggara dan penyalur bantuan sosial masyarakat, serta pemerintah daerah Kota Makassar dalam hal ini kantor DPRD kota Makassar, dengan alasan bahwa pemerintah sebagai pengambil keputusan terhadap program-program kesejahteraan sosial.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami femomenan tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata memanfaatkan berbagai metode alamiah (Tohirin 2013: 3). Alasan memilih jenis ini adalah karena dalam penelitian ini peneliti berupaya menggali data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli dan data hasil

pengamatan di lapangan terkait program pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di kota Makassar.

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal, antara lain:

a. Penerapan program kesejahteraan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin di Kota Makassar.
b. Faktor determinan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin Kota Makassar.
c. Strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan penyaluran hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kota Makassar.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

a. Penerapan program kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program yang di bentuk oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) antara lain, meliputi:
    1) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
    2) Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya

dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin.

3) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
4) Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan bagi keluarga miskinan dan rentan miskin yang ingin menyekolakan anaknya secara gratis.
5) Kartu Indonesia Sehat (KIS) memberikan jaminan kepada pemegangnya untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan. Bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan keluarga menurut Khomson adalah faktor internal, eksternal;
   1) Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan;
   2) Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteran adalah kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan dan lokasi tempat tinggal.

c. Strategi yang dilakukan untuk pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 antara lain:
    1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
    2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
d. Standar kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah:
    1) Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin), adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu Indikator tahapan keluarga sejahtera I.
    2) Keluarga Sejahtera I (miskin), adalah keluarga yang baru dapat memenuhi Indikator-indikator berikut:
        a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
        b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
        c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik;
        d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawah kesarana kesehatan;
        e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana kontrasepsi;
        f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

d. Standar kemiskinan yang menjadi ukuran dalam penelitian ini adalah menurut BKKBN yang menggunakan data mikro, dimana sebuah keluarga disebut miskin jika :

1) Tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban rutin dalam agamanya;
2) Tidak bisa makan dua kali dalam sehari;
3) Tidak mempunyai pakaiaan lain untuk bekerja bersekolah dan melakukan aktifitas lainnya;
4) Tinggal di rumah yang sebagian besar ruangannya berlantai tanah;
5) Tidak bisa membayar biaya fasilitas kesehatan.

C. Sumber Data dan Informan Penelitian

1. Sumber Data

Pengambilan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data antara lain:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen kepada responden yang ada dan berhubungan langsung dengan permasalahan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelusuran dan dokumen, referensi-referensi, Peraturan Perundang-undangan, serta media lainnya yang relevan dengan masalah pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

2. Informan Penelitian

Peneliti akan memperoleh data melalui beberapa informan antara lain adalah:

a. Anggota DPRD Kota Makassar;
b. Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar;
c. Mayarakat miskin yang berdonensili di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Manggala, Kelurahan Tamanggapa Serta,
d. Informan lain yang dianggap mengetahui tentang program kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

D. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka instrument penelitian yang peneliti gunakan untuk melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melaui pedoman observasi, pedoman wawancara, pengkajian dan telaah dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk menjaring dan memperoleh data secara lengkap tentang pemenuhan hak kesejahteraan sosial

masyarakat miskin dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi/ pengamatan, interview/wawancara dan dokumen (Sugiyono (2015: 308).

1. Observasi

Dalam kegiatan observasi, peneliti telibat langsung dalam kegiatan sehari-hari di lokasi penelitian dan merasakan langsung kehidupan yang dirasakan oleh informan. Selain itu, peneliti mengamati langsung kondisi kesejahteraan sosial baik secara fisik maupun nonfisik. Dimana melihat kondisi perumahan dan perlengkapannya serta kondisi kehidupan sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya mulai dari malam hari sampai siang.

2. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Kegiatan wawancara dilakukan langsung oleh peneliti kepada informan, diantaranya anggota DPRD Kota Makassar, pegawai Dinas Sosial Kota Makassar, pegawai/RT/RW Kelurahan Tamangapa serta berapa masyarakat miskin yang berdomisili di lokasi TPA. Sebagai alat bantu dalam kegiatan wawancara adalah Tape Recorder, Buku Catatan dan Kamera.

3. Dukumen

Setelah penelitian dilapangan, peneliti melakukan telaah dokumen, dimana menggunakan bahan tertulis berupa buku-buku ilmiah, perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang dapat mendukung penulisan penelitian

ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen pribadi seperti buku harian dan otobiografi berupa riwayat hidup peneliti dan informan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Proses analisis data dalam penelitian ini, dimana peneliti mengunakan pendapat Miles dan Huberman (2014) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas peneliti dalam analisis data antara lain:

1. Pengumpulan data, peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh dilapangan baik melaui hasil wawancara, observasi maupun telaah dokumen.
2. Reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Selain itu memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu dengan mengunakan alat computer.
3. Display data, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, kemudian menguhunbungkan antara karegori yang satu dengan yang lain dalam bentuk naratif.

4. Kesimpulan atau Verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan awal selama penelitian, namun masih bersifat sementara, dan berubah pada saat ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengujian Keabsahan Data

Peneliti dalam menemukan keabsahan temuan tentang pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin maka, teknik yang digunakan dalam pemeriksaan adalah (a) perpanjangan keikutsertaan pengamat; (b) trianggulasi (Tohirin, 2013: 72) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan, dimana peneliti mengecek kembali apakah data yang telah terkumpul merupakan data yang sudah benar atau tidak. Dari hasil pengumpulan data dan setelah peneliti mengecek kembali kepada sumber aslinya ternyata masih terdapat data yang tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan kembali sampai memperoleh data yang pasti kebenarannya. Waktu yang peneliti gunakan untuk perpanjangan pengamatan adalah dua minggu.

2. Trianggulasi

Peneliti menggunakan trianggulasi sumber dalam memeriksa keabsahan data dari informan lain. Dimana, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga miskin di lokasi lain, serta berapa informan tambahan yaitu ketua RT/RW dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dengan maksud untuk memastikan dan membandingkan informasi yang telah diberikan oleh informan utama dengan informasi yang diberikan oleh informan tambahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Kota Makassar

Secara keseluruhan Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 Km² yang terdiri dari 14 Kecamatan. Kota Makassar secara adminitratif sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pusat perkembangan dan pelayanan pembangunan. Secara geografis kota Makassar selain sebagai pusat pengembangan dan pelayanan pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang letak dipesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119 24,17,29'' – 119 32''31'',03'' Bujur Timur dan antara 5° 30, 81-5° 14'' 6, 49'' Lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-25m dari permukaan laut, dengan suhu antara 22° C sampai dengan 32°C dan curah hujan antara 2000-3000 mm dengan rata-rata hujan 108 hari pertahun. Adapun atasan-batasan adminisntasi kota Makassar sebagai berikut:

Table 4.1 Batas Wilayah Kota Makassar

NO	Batas Wilayah	Nama Wilayah
1	Sebelah Utara	Kabupaten Maros
2	Sebelah Timur	Kabupaten Maros
3	Sebelah Selatan	Kabupaten Gowa
4	Sebelah Barat	Selat Makassar

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Desember 2016

2. Visi dan Misi Kota Makassar

Kota Makassar telah menetapkan Visi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar dengan rumusan, yakni: “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya, dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”.

Visi jangka panjang tersebut perlu dijabarkan dalam Visi lima tahunan pemerintah kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan Visi jangka panjang dan sikap konsistensi pemerintah kota, sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi Makassar sebagai kota maritim, sebagai simpul kegiatan niaga dan pendidikan dikawasan Timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan Misi pemerintah kota Makassar Tahun 2010 adalah “ *Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Memanusiawi*”. Adapun Misi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

a. Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh perkembangannya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya;

b. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar;
c. Terwujudnya atmosfer pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti dan relevan dengan pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
d. Terwujudnya Makassar sebagai kota Maritim, Niaga dan pendidikan ini dilandasi oleh martabat para aparat pemerintah kota, warga kota dan pendatang yang memanusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya yang menjaga keharmonisan.
e. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam.

Berdasarkan gambaran umum kota Makassar tersebut di atas maka dapat kita lihat beberapa perubahan besar yang terjadi selama ini terutama dalam hal pembangunan yang jauh dan cepat perubahannya. Hal itu juga terjadi dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang tinggi di kawasan Timur Indonesia. Kondisi tersebut tercermin dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungan hidup masyarakat Makassar secara keseluruhan.

3. Data Kemiskinan Kota Makassar

Data kemiskinan diambil dari data BPS dan data dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk kota Makassar Tahun 2014 berjumlah 1.429,2 Ribu jiwa. Lebih lanjut BPS mengindentifikasi indikator kemiskinan untuk Kota Makassar Tahun 2012 sampai 2014.

Table 4. 2 Identifikasi Kemiskinan Kota Makassar

Tahun 2012 sampai 2014

No	Tahun	Jumlah Jiwa	Indeks Kedalamam (P1)	Keparahan (P2)	Persentasi (%)
1	2012	69,9 Ribu	0,76	0,17	5,02
2	2013	66,40 Ribu	0,84	0,24	4,70
3	2014	64,23 Ribu	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Desember 2016

Jika diukur dari jumlah penduduk kota Makassar secara keseluruhan maka pada tahun 2014 jumlah penduduk yang tidak berada di garis kemiskinan berjumlah 1.364,97 Ribu jiwa atau 95, 50%. Sedangkan yang tersisa adalah berjumlah 64,23 Ribu jiwa atau 4,50%. Sedangkan data kemiskinan di tahun 2015 sampai 2016 belum terkafer secara keseluruhan. Apabila kembali dilihat dari tahun sebelumnya maka, identifikasi kemiskinan di kota Makassar memang mengalami penurunan namun elastis sedikit. Hal ini terlihat dari selisi jumlah dari tahun ke tahun hanya kurang lebih 1% penurunannya.

Selain itu identifikasi dari BPS, maka data lain jumlah keluarga miskin yang didata oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Tahun 2015 untuk 14 Kecamatan adalah sebagai berikut:

Table 4.3 Data Keluarga Fakir Miskin

Kota Makassar Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Fakir Miskin
1	Tamalanrea	3279
2	Rappocini	5632
3	Mariso	5639
4	Bontoala	3010
5	Mamajang	2525
6	Makassar	7838
7	Biringkanaya	5206
8	Ujung Tanah	3778
9	Ujung Pandang	1050
10	Wajo	825
11	Tallo	11211
12	Panakukang	8259
13	Manggala	5750
14	Tamalate	7427
	JUMLAH	71429

Sumber: Dinas Sosial Desember 2016

Data keluarga fakir miskin yang didata oleh BPS itu termasuk pada data keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dilihat dari jumlah per kecamatan maka, itu bukan sedikit manusia yang berada pada masalah kesejahteraan. Apalagi jumlah secara keseluruhan yang mencapai 71429 jumlah kepala keluarga yang mengalami kondisi yang sama, hal itu sangat tidak dipungkuri bahwa itu adalah persoalan yang harus dipikirkan dan dicari solusi pemecahannya. Jumlah kemiskinan yang diperoleh dari BPS berbeda dengan TKSK, namun yang perlu diperhatikan adalah angka pencapaiannya yang sangat tinggi bukan perbedaannya, itulah yang menjadi tanggung jawab bersama.

4. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini peneliti mengunakan purvosive sampling, dimana peneliti telah memilih dan memilah informan dengan karakteristik yang telah ditentukan. Informan yang telah ditentukan dianggap sangat mengetahui kondisi kesejahteraan sosial di kota Makassar sehingga dapat memberikan data dan informasi yang valid. Informan tersebut memiliki pekerjaan dan status yang berbeda, selain itu, informan juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang persoalan kesejahteraan sosial. Informan yang namanya terlampir dibawah ini adalah gabungan informan utama dan informan tambahan, oleh karena itu peneliti melampirkan data informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Table 4. 4 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	JK	Instansi	Jabatan/ Status
1	Mario David Pn, S.Sos, MM	L	Kantor DPRD	Anggota Dewan Komisi D Bagian Kesra/Ketua Fraksi Nasdem
2	Baharuddin Ghalib, SE. MM	L	Kantor Dinsos	Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
3	La Heru, S.Sos. MSi	L	Kantor Dinsos	Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial
4	Nadira, SP	P	Kantor Dinsos	Staf Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
5	Hamsi Azis, S.Sos	L	Kantor Dinsos	Anggota TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
6	Hadaya	P	Kantor Lurah	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat/Kesra
7	Muhamad Paris	L	Kelurahan	Ketua RW 04 Kelurahan Tamangapa
8	Abdulrahman Dynai	L	Kelurahan	Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Tamangapa
9	Domensen Syki	L	-	Masyarakat Miskin
10	Muhamad Ali	L	-	Masyarakat Miskin
11	Masita	P	-	Masyarakat Miskin
12	Disaro	L	-	Masyarakat Miskin
13	Marni	P	-	Masyarakat Miskin
14	Dnai	P	-	Masyarakat Miskin
15	Siti	P	-	Masyarakat Miskin
16	Ace	P	-	Masyarakat Miskin
17	Naharia	P	-	Masyarakat Miskin

Sumber : Hasil Penelitian Desember 2016

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian ini, akan peneliti kemukakan permasalahan yang menjadi fokus utama yaitu meliputi penerapan program kesejahteraan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin, faktor determinan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin serta strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di kota Makassar.

1. Penerapan Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin di Kota Makassar

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan itu, maka telah diprogramkan beberapa program sosial demi terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan perumahan) masyarakat miskin. Program-program tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan La Heru selaku kepala seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa:

> Kami dari Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai beberapa program fokus untuk fakir miskin diantaranya: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Beras Miskin (RASKIN/RASTRA), semua kartu ini di usahakan agar diterima oleh setiap kepala keluarga (Wawancara 22 Desember 2016).

Yang dikemukakan oleh La Heru adalah merupakan program utama yang selama ini menjadi prioriras pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial masyarakat miskin, diantaranya, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) serta Raskin/Rastra. Untuk lebih jelas, penerapan dan sistem pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolakan anaknya secara gratis. Selain itu, KIP juga akan menjangkau anak-anak yang berada diluar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel. Sesuai dengan hasil wawancara dengan La Heru bahwa:

> KIP diberikan juga kepada anak-anak yang tidak mendapat pendidikan formal agar mendapat pendidikan dan ketrampilan. Penerima kartu ini hanya tinggal menunjukan kartu KIP ke pihak sekolah dan balai-balai latihan.

KIP merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 Tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan atau anak yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu alasan mengapa anak-anak perlu diberikan KIP? Sesuai dengan hasil wawancara dengan La Heru menyatakan bahwa:

> KIP diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri. Program KIP diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementrian Agama (Kemenag).

Kartu KIP berfungsi sebagai penerima bantuan dana pendidikan untuk siswa miskin, caranya dengan menunjukan katru KIP kepada pihak sekolah swasta atau Negeri dimana tempat anak belajar. Kartu tersebut bisa digunakan untuk

mengganti biaya pendidikan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ghalib bahwa KIP baru bisa digunakan tahun 2015 karena masalah dana.

Adapun tujuan dari program Indonesia Pintar melalui KIP adalah sesuai hasil wawancara dengan Ghalib menyatakan bahwa (1) menghilangkan hambatan anak usia sekolah secara ekonomi untuk berpartisipasi disekolah untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih baik dari tingkat dasar samapi menengah, (2) mencegah anak mengalami putus sekolah karena ekonomi, (3) membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran serta, (4) mendukung penuntasan wajib belajar Sembilan tahun.

Lebih lanjut Ghalib menjelaskan bahwa dana yang diberikan untuk siswa sekolah dasar satu semester sebesar Rp. 225.000 sementara untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan dana Rp. 375.000/Semester. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) rata-rata mendapatkan bantuan pendidikan Rp. 500.000/Semester.

Upaya penyaluran KIP di daerah ini diakui pemerinta bahwa bukan perkara yang mudah. Sejumlah kendala yang masih terus dihadapi namun segera dilakukan solusinya, khususnya perihal data valid penerima KIP. Kendala yang dihadapi terutama dalam hal penyalurannya, antara lain karena alamat penerima tidak dikenal, sudah pindah atau penerima sudah meninggal dunia. Selain itu, ada pula penerima yang menolak KIP karena merasa mampu.

b. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kartu Indonesia Sehat (KIS) memberikan jaminan pada pemegangnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuannya untuk meringankan beban masyaraka miskin terhadap kesehatan. Tata cara pembuatan kartu KIS sesuai hasil wawancara dengan Ghalib menyatakan bahwa "Cara pembuatan KIS tidak berbeda dengan JKN, karena KIS tidak menggantikan JKN. Bahkan para anggota JKN yang memegang KIS akan mendapatkan sejumlah Benefit misalnya edukasi" (wawancara 21 Desember 2016)

Jumlah penerima KIS bertambah karena menanggung penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tidak masuk data penerima bantuan iuran seperti anak jalanan atau gelandangan. Sangat diharapkan seluruh penduduk prasejahtera di Indonesia memiliki kartu tersebut. Pendistribusian akan dibantu oleh PT Pos Indonesia dan perbankan yaitu Bank Mandiri.

Terkait dengan biaya premi KIS, sesuai hasil wawancara dengan La Heru menyatakan bahwa untuk saat ini biaya premi untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) sama dengan JKN. Dimana terbagi atas 3 kelas yaitu kelas 1 dengan harga Rp. 59.500, kelas 2 Rp. 42. 500, dan kelas 3 Rp. 25. 500. Jadi masyarakat akan membayar sesuai kelas mana dan kesanggupan mereka membayar premi tersebut.

Selain itu, KIS berfungsi untuk membantu masyarakat miskin yang saat berobat ke rumah sakit. Dengan kartu tersebut masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas atau di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pemerintah setempat.

c. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan La Heru menyatakan bahwa :

> PKH mulai dilaksanakan di Indonesia Tahun 2007 dan dilaksanakan secara berkesinambungan hingga Tahun 2015. Tahun 2007 merupakan tahap uji coba dan dianggap berhasil sehingga dilanjutkan sampai sekarang.

Komponen yang menjadi fokus utama PKH adalah pendidikan dan kesehatan, yang tujuannya untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sangat miskin melaui pemberian insentif. Sedangakan komponen pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan angka partisispasi pendidikan dasar wajib 9 Tahun serta mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Selanjutnya La Heru menegaskan bahwa:

> Calon penerima PKH harus menandatangani persetujuan bahwa mereka menerima bantuan maka akan menyekolakan anak 7- 15 Tahun, membawa anak usia 0-6 Tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan, untuk ibu hamil harus memeriksakan kesehatan janinnya ke puskesmas sesuai prosedur kesehatan PKH.

Pihak-pihak yang terkait dengan program PKH sesuai dengan hasil wawancara dengan Ghalib adalah Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota, dan pendamping PKH. UPPKH pusat merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan

program sekaligus melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta penyediaan bantuan yang dibutuhkan. UPPKH Kabupaten/Kota melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberikan bantuan jika diperlukan. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjebatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten/Kota. Tugas pendamping juga melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pendampingan terhadap para penerima manfaat.

Suatu alasan kenapa perlu adanya pendampingan, sesuai hasil wawancara dengan La Heru banhwa "Sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang sesunggunya". Untuk itu mereka membutukan pejuang untuk menyuarakan hak mereka.

d. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

KKS adalah pengganti KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang berfungsi sebagai penanda bahwa si pemegang kartu ini berhak menerima bantuan uang dari pemerintah. Akan diberikan SIM Card yang bisa di pasang di Handphon untuk mengecek saldo. Untuk lebih jelas mengenai proses memperoleh KKS sesuai hasil wawancara dengan Ghalib, menyatakan bahwa:

> Bagi mereka yang tidak memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) maka ke kantor Pos membawahkan KTP dan kartu keluarga. Setelah KPS diserahkan dan diferivikasi oleh petugas Kantor Pos maka selanjutnya warga akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera.

Selanjutnya, penegasan oleh Kemensos melalui wawancara dengan La Heru, menyatakan bahwa warga yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan lain sebagainya akan memperoleh kartu KKS. Sistem perolehannya secara bertahap.

Lebih lanjut Ghalib menyatakan bahwa selama ini Kartu Keluarga Sejahterara (KKS) yang diberikan pemerintah berbasis pada identitas. Yaitu hanya yang memperoleh identitas diri atau kartu penduduk. Sedangkan apabila mereka tidak memiliki kartu penduduk maka secara jelas tidak akan mendapatkan kartu tersebut. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk program ini adalah berasal dari Kemensos yang dikelola oleh bendahara Negara sebesar Rp. 6,4 Triliun.

e. Raskin

Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui distribusi beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Sesuai hasil wawancara dengan La Heru bahwa “Sasaran program Tahun 2010 adalah berkurangnya beban pengeluaran 17,5 Juta rumah tangga sasaran melalui distribusi beras sebanyak 156kg/RTS/Tahun atau 13 Kg/Bulan dengan harga Rp. 1.600/kg”.

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Desa/ Kelurahan dalam hal pendistribusian raskin dan penyelesaiaan pembayaran serta

administrasi di wilanyanya. Untuk pelaksanaan distribusi raskin dapat melalui kelompok kerja, warung desa maupun kelompok masyarakat.

Dalam hal penetapan penerima raskin sesuai dengan hasil wawancara dengan La Heru bahwa:

> Kalau penetapan penerima manfaat program raskin di Desa/ Keluarahan melalui musyawarah. Dimana nama calon penerima bantuan ditetapkan secara bersama. Dan daftar RTM penerima manfaat raskin dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Desa/Lurah dan diserahkan oleh camat setempat.

Lebih jelas La Heru memberikan keterangan tentang mekanisme distribusi Raskin. Bupati/Wali Kota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada setiap Kecamatan dan Kelurahan. Berdesarkan SPA menerbitkan SPPB/ DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada satker raskin pada saat beras akan didistribusikan ke titik distribusi. Berdasarkan SPPB/DO satker raskin mengambil beras di gudang penyimpanan perum Bulog. Pelaksanaan distribusi menyerakan beras kepada rumah tangga miskin penerima manfaat raskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili.

Sedangkan pembiayaan subsidi raskin disediakan oleh pemerintah dalam bentuk subsidi pangan. Biaya operasional dari titik distribusi sampai rumah tangga sangat miskin menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota dan beban perum Bulog. Untuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung tim kootdinasi Raskin Pusat sampai daerah menjadi beban APBN/APBD dan atau operasional Perum Bulog.

Selain program prioritas di atas, ada juga program tambahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kota Makassar yaitu Mario David Pn menyatakan bahwa:

> Masyarakat miskin di Kota Makassar memang cukup banyak data terakhir dari KB 172.000 jiwa, data ini yang dipakai untuk BPJS, untuk itu pemerintah mensubsidi kesehatan dan beras miskin untuk mereka'' Selanjutnya Mario menegaskan bahwa "upaya pemerintah selama ini adalah kesehatan gratis dalam bentuk BPJS oleh pemerintah dengan besar anggaran 42 M, sedangkan pendidikan diberikan dalam bentuk penerimaan siswa setiap sekolah wajib menerima warga miskin di sekolah sebanyak 10%, ada pula raskin dan ekonomi lorong yakni pemberian bantuan bibit untuk kelompok usaha seperti ikan, perkebunan dan lain-lain. Selain program di atas, Mario menyebutkan program lain yaitu bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang berperkara yang telah dibuatkan perdanya dan anggaran yang tersedia adalah 5-15 juta untuk satu perkara serta menyediakan tim bantuan hukum atau pengacara. Ada pula Perda No. 2 Tahun 2016 yang berlaku untuk CSAR dimana untuk seluruh perusahan harus bisa melihat warga miskin yang ada di sekitarnya untuk memberikan modal kerja 2% kepada warga miskin. (Wawancara 27 Desember 2016)

Sangat jelas dalam keterangan Mario David di atas bahwa banyak program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar selama ini sasarannya untuk memenuhi hak kesejahteraan sosial masyarakat. Dimana pemerintah telah mensubsidi kesehatan dan rakin untuk masyarakat yang tidak mampu dengan mengaplot dana yang besar untuk program-program tersebut. Selain itu, ada juga program-program lain yang berfungsi sebagai stimulan seperti usaha ekonomi lorong yang di prioritaskan untuk kelompok dan juga bantuan secara individu. Bantuan hukum juga telah di sediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar bagi masyarakat miskin yang berperkara. Dengan sistem ini maka, dapat mengurangi beban hidup masyarakat kurang mampu tersebut.

Selain itu, program lain juga yang telah dilakukan oleh kementrian sosial melalui Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan yaitu bagian Usaha Kesejateraan Sosial (UKS) dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Nadira, menyatakan bahwa:

> Upaya pemerintah untuk masalah kemiskinan sekarang ini program dari UKS untuk anak terlantar yang ditemukan di jalan maka akan diangkut dan di kirim ke Maros, dan ada pula paket bantuan berupa perlengkapan mayat untuk keluarga Muslim yang meninggal (Wawancara 21 Desember 2016).

Program yang dilakukan oleh bidang UKS ini menurut Nadira cukup efektif dalam menanggulangi masalah sosial dalam kota Makassar. Anak-anak terlantar yang diangkut ke panti tersebut akan diasramakan dan mendapat bimbingan, pelatihan dan pembelajaran khusus. Dengan maksud bahwa suatu saat mereka akan bisa dan lebih mandiri tanpa orang tua mereka. Sedangkan bantuan langsung paket mayat tersebut juga sangat membantu keluarga miskin yang tidak mampu dimana mengurangi beban pengeluaran pada saat keluarga mereka meninggal.

Program lain yang dilakukan oleh bagian bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Burhanuddin Ghalib menyatakan bahwa:

> Kami menyediakan beberapa bantuan stimulan berupa: KUBE (Kelompok Usaha Bersama), UEP (Usaha Ekonomi Produktif) ini diberikan bantuan berupa barang kompor, wajan dan lain-lain dan tidak berupa uang, E-WARUNG (melayani orang miskin) ini kerja sama dengan Bulog, BRI, PKK, dan PKH. Program E-warung ini melayani 150 kepala keluarga. Selain bantuan tersebut. Ghalib juga mengatakan bahwa ada program lain selain itu; diantaranya KIS, KIP, PKH dan lain-lain. Sedangkan program penerima manfaat sekarang diterima oleh

> 12.000 jiwa yang dulunya disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) sedangkan sekarang diganti menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Serta setiap kepala keluarga akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bentuknya seperti ATM (Wawancara 21 Desember 2016)

Begitu banyak program yang telah direncanakan dan dilakukan oleh Bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial. Program disini banyak bentuknya stimulan, dimana program diberikan untuk memangcing penerima manfaat tersebut untuk bisa berusaha sendiri dalam mencari modal dan mengembangkan usaha. Program tersebut dilakukan selama ini dan dianggap cukup membantu banyak masyarakat yang ingin buka usaha namun kekurangan dana, dengan adanya program tersebut maka pemerintah membantu mereka dalam memberikan barang atau alat yang diperlukan untuk usaha mereka.

Program-program yang telah diterapkan pemerintah, ingin mencapai target yang diharapkan yaitu pemerataan kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat miskin di Kota Makassar, namun kenyataan masih terdapat kesenjangan dimana, program tersebut belum terrealisasi dengan baik dan merata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Domensen Syki seorang warga miskin menyatakan bahwa:

> Saya punya kartu KIS, sedangkan tidak tahu bantuan pemerintah yang lainnya, tapi yang saya tahu adalah minyak, beras, gula, biscuit indomi dan lain-lain dalam satu paket. Kalau ada orang bagi bantuan maka mereka kasih lain par kami, biasanya pada saat lebaran kami terima bantuan itu dan itu bantuan sukarela tapi bukan dari pemerintah (Wawancara 22 Desember 2016).

Apabila kita cermati pendapat Syki maka yang jelas bahwa bantuan yang mereka terima itu bukan bantuan langsung dari pemerintah melainkan dari kelompok atau lembaga sosial yang sering memberikan bantuan tersebut. Hal ini

menunjukan bahwa bantuan pemerintah lainnya belum menyentuh mereka. Kondisi tersebut tidak berbeda jauh dengan pendapatnya beberapa informan di lokasi yang sama, berdasarkan hasil wawancara dengan:

> Ali, maaf KIS, KIP, PKH itu program yang bagaimana itu? dan selama ini saya juga tidak tahu apa itu program pemerintah (23 Desember 2016).
>
> Masita, saya tidak tahu apa itu PKH, saya tidak punya semua kartu, tapi dulu ada namanya Jamkesmas itu yang ada. Selain itu saya juga perna menerima bantuan dalam bingkisan dan baju-baju bekas (23 Desember 2016).
>
> Disaro, kami tidak perna dapat raskin tapi perna terima nasi bungkus dan bingkisan sembako (23 Desember 2016).
>
> Marni, Saya tidak perna terima bantuan yang dalam bingkisan itu karena kami tinggal jauh dari jalan, dan kami keluarga juga tidak perna dapat Raskin (28 Desember 2016).
>
> Dnai, apa maksudnya raskin? Saya tidak perna dapat uang atau sejenis itu, tapi saya tidak melapor juga. Kami tidak punya semua kartu itu karena kami tidak tahu semua itu. Dulu rumah kami kebakaran tapi tidak ada bantuan apapun sampai sekarang, memang saya sudah lapor tapi tidak juga ada bantuan, jadi pa sendiri kerja rumah pakai bahan bekas (28 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa masyarakat miskin belum menikmati bantuan dan program-program pemerintah selama ini. Jangankan mereka memiliki kartu, mendengar nama program tersebut saja belum perna. Yang sering mereka dapat dan rasakan langsung adalah bantuan dalam bentuk bingkisan pada hari raya besar keagamaan atau bantuan dari kelompok sosial tertentu saja. Walaupun kita sadari bahwa program dan bantuan-bantuan itu sasarannya ke masyarakat yang berhak menerima manfaat tersebut. Yang perlu dipertanyakan program selama ini diarahkan kemana dan untuk siapa program tersebut. Selain hasil wawancara di atas ada juga pendapat lain yang senada

dengan hasil sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara (29 Desember 2016) dengan:

> Siti, menyatakan bahwa saya ada kartu KIS, kalau KIP adik saja yang dapat sedangkan kakanya tidak. Selain itu kami juga kadang dapat bingkisan di bulan Puasa.
>
> Ace, juga memberikan keterangan bahwa bantuan yang perna kami terima berupa BBM dan BLT. Kalau kartu yang lain semua tidak ada.
>
> Keterangan lanjut oleh Naharia bahwa, saya punya 2 anak yang masih sekolah dan yang adik saja punya KIP sedangkan kakanya SMA tidak punya itupun salah nama tetapi kalau raskin kami dapat. Selanjutnya ibu siti mengungkapkan bahwa "Kita tidak pungkiri bahwa bantuan pemerintah ada kepada kami pada saat rumah kami terbakar, bantuan yang diberikan adalah berupa balok, daun seng 5 lembar, pembalut, sabun mandi, piring plastik, handuk, dan makanan jadi 3 kaleng"

Kondisi ini juga menunjukan bahwa pemberian bantuan belum merata atau tidak menyeluruh karena ada yang menerima dan ada pula warga yang tidak menerima. Selain itu ada pula warga yang baru menerima sebagian bantuan sedangkan bantuan lainnya belum.

Kondisi tersebut terbukti dalam hasil observasi langsung dilapangan (Observasi 28 Desember 2016), masih ditemukan warga yang kondisi perumahannya tidak layak dihuni. Rumah berlantai tanah, beratap seng, berdinding tripleks/daun seng, tidak memiliki perlengkapan rumah yang lengkap. Selain itu, sarana penerangan dan air bersih yang mereka gunakan adalah sistim sewa, pembayarannya setiap bulan. Keadaan hidup mereka dengan serba keterbatasan tersebut berpengaruh pula terhadap kehidupan sosial mereka.

Selain itu, hasil Observasi (29 Desember 2016 dan 7 Januari 2017), bahwa Kehidupan sosial kemasyarakatan nampak, dimana hubungan antara anggota keluarga, kehidupan bertetangga, musyawarah dalam keluarga, serta

partisipasi dalam kegiatan kemasyarakat yang tidak terjalin dengan baik. Kondisi tersebut terjadi, dikarenakan setiap anggota keluarga lebih memfokuskan kesehariaannya untuk bekerja dan mencari uang. Mereka tidak memerdulikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, misalnya melakukan kunjungan ke rumah-rumah tetangga, dan sebagainya. Ada pula ditemukan keluarga yang pada saat hari raya tidak menikmati dengan nyaman bersama keluarga dan tetangga, karena kondisi kehidupan dan keterbatasan yang mereka miliki.

Peneliti mengalami langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat miskin pada saat melakukan penelitian. Sangat nampak bagaimana kehidupan masyarakat yang kurang mampu itu. Mereka begitu menderita, tidak mampu, tidak berdaya untuk melakukan yang lebih baik dan lebih besar dari yang mereka inginkan. Penghasilan secukupnya hanya untuk kebutuhan makan dan pakaian setiap bulan. Keinginan besar untuk merubah hidup mereka itu tidak mungkin terjadi, yang mereka pikirkan hanya bekerja untuk mendapatkan uang demi mempertahankan hidup mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa banyak program sosial yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar demi mensejahterakan masyarakat miskin namun belum terealisasi secara merata. Dimana telah terbukti bahwa banyak masyarakat yang belum mengenal program dan belum perna mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Kondisi demikian menunjukan bahwa masyarakat miskin belum terpenuhi hak sosialnya secara merata.

B. Faktor Determinan dalam Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial di kota Makassar

Banyak program atau upaya pemerintah telah dilakukan untuk memenuhi hak-hak sosial masyarakat miskin. Namun, kenyataannya program tersebut belum terlaksana dengan baik dan terealisasi secara meratah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor Eksternal

Dampak terhadap kurang efektifnya pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial dikerenakan oleh verifikasi data, sistem sosialisasi dan informasi, pengaruh politik dan anggaran, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Verifikasi Data

Data merupakan hal yang paling mendasar dan penting dalam suatu program. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk merekrut semua masyarakat miskin, namun nama-nama yang terkafer dalam penerima bantuan belum rill sesuai dengan kenyataan. Dimana, banyak masyarakat yang belum terdata dalam satu program penerimaan bantuan baik dari pusat maupun di daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan tenaga pendata, sesuai dengan hasil wawancara dengan Nadira menyatakan bahwa;

> TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) jumlahnya 14 orang untuk 14 Kecamatan dibantu oleh 1 orang pendamping dan melakukan pendataan 5 Tahun sekali. Memang ada masyarakat yang belum terdata. Selain itu, Nadira juga menegaskan bahwa TKSK mengalami kewalahan pada saat pendataan karena Cuma dua orang petugas yang melakukan pendataan. Ada juga temuan pada saat pendataan banyak masyarakat menganggap dirinya miskin, tetapi pada saat ada bantuan baru dia melapor dirinya miskin.

Jumlah tenaga TKSK di kota Makassar berjumlah 14 orang sesuai dengan jumlah kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas jelas tidak efektif, secara logis apakah satu orang mampu mendata ratusan sampai ribuan orang dalam satu kecamatan, jelas itu tidak mungkin. Petugas tersebut mengalami kewalahan pada saat pendataan karena cuma dibantu satu orang pendamping.

Informasi tersebut peneliti melakukan kepastian informasi dengan mewawancarai petugas TKSK secara langsung. Dalam hasil wawancara dengan Hamsi Azis menyatakan bahwa:

> Kendala-kendala yang dihadapi oleh kami selama ini adalah terbatasnya tenaga formal yang mendata, jangkauan wilayah kerja yang luas sehingga sulit dijangkau, serta jumlah penduduk yang banyak sehingga kami tidak mampu mendata semua penduduk yang mengalami masalah kesejahteraan sosial (Wawancara 23 Desember 2016).

Tugas utama dari TKSK adalah melakukan pendataan serta pendampingan terhadap penduduk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). TKSK mengalami kesilitan dan kewalahan pada saat melakukan pendataan, dengan keterbatasan tenaga untuk mendata jumlah penduduk yang padat. Selain itu, jangkauan wilayah kerja yang sangat luas dan tidak mampu dijangkau secara efisien oleh petugas tersebut. Memang pendataan dilakukan selama 5 tahun sekali, namun ada yang namanya data insidentil yang diambil datanya setiap peristiwa sosial terjadi di kecamatan, seperti cacat, kecelakaan dan lain-lain. Hal lain mengenai data dikemukakan oleh La Heru bahwa:

> Data penerima bantuan diakomodir dari BPS terus ke TP2K dan dilanjutkan ke kementrian sosial dan diakses untuk menerima bantuan dengan rentang waktu 5 Tahun sekali pendataan. Memang masyarakat urban banyak belum terakomodir karena belum terdaftar dan belum

> punya KTP. Kendalanya karena mereka sendiri tidak mau merubah datanya serta kesadaran yang kurang matang serta sendiri tidak mau merubah dirinya.

Jelas sekali dalam pendapatnya La Heru bahwa data yang di ambil dan didata itu adalah data yang diakomudir selama 5 Tahun sekali. Data tersebut dilanjutkan ke Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) di pusat. Data penerima bantuan tahun 2016 masih menggunakan data BPS tahun 2011, sedangkan data terbaru belum terealisasi. walaupun kenyataan yang terjadi banyak penduduk yang tidak menetap dan terjadi urban atau sebaliknya, itu yang sering tidak ter update datanya karena tidak meliki KTP dan kartu keluarga.

Selain itu, persoalan yang terbesar yang berkaitan dengan pendataan adalah masalah pendanaan. Hal ini dikemukakan oleh salah satu anggota DPRD Kota Makassar melalui Hasil wawancara yaitu Mario David menyatakan bahwa:

> Persoalan yang terbesar adalah pendataan verifikasi baru sekitar 100.000 orang yang baru mengakses anggaran BPJS. Memang ada anggaran tapi tidak terakses, makanya banyak masyarakat miskin yang sampai sekarang belum memiliki kartu kesejahteraan sosial. Itu tanggung jawab besar dinas sosial. Selain itu, Mario juga menegaskan bahwa ada tim yang namanya TKSK yang merupakan arahan dari Kemensos. Tetapi tim ini lemah karena cuma 1 orang dalam 1 kecamatan, jadi 14 orang untuk 14 Kecamatan. Data di akses sendiri ada pula dibantu oleh RT/RW.

Mario David melihat bahwa sangat banyak warga yang belum mengakses bantuan karena belum terakomudir dalam data penerima bantuan. Secara jelas bahwa TKSK jumlahnya masih kurang, yang hanya 14 orang untuk 14 kecamatan. Mario menyatakan bahwa tim tersebut sangat lemah, karena tidak mampu mendata semua penduduk yang berhak untuk menerima bantuan. Idealnya tenaga TKSK berjumlah satu orang/ 1 kelurahan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal

tersebut. TKSK itu merupakan tenaga kontrak dari pusat yang dipekerjakan untuk daerah, jumlah yang terbatas itu karena keterbatasan anggaran baik dari pusat maupun daerah.

Selain itu, Hadaya seorang pegawai kantor kelurahan dalam percakapan wawancaranya menegaskan bahwa:

> Memang data diambil dari RW/RT atau dari sensus penduduk dan BPS. Kami kantor lurah hanya langsung menerima dalam bentuk kartu-kartu. Semua cetakan kartu dari pusat tetapi yang mendata adalah dari dinas sosial. Lebih lanjut Hadaya menyatakan bahwa apabila ada bantuan maka kami panggil RT/RW untuk memberitahukan bahwa warganya ini yang menerima bantuan. Disana juga mereka memberikan keterangan bahwa ini adalah lebih berhak maka itulah yang diusulkan lagi nanti untuk bantuan berikutnya.

Semua nama-nama penerima bantuan sosial itu dari pusat. Pada saat kartu program tersebut ada maka pihak kelurahan memanggil RT/RW untuk memberikan keterangan tentang warganya yang menerima bantuan tersebut. Secara otomatis bahwa pihak kelurahan juga tidak mengetahui dari mana data penerima bantuan diambil. Karena data semua dikirim dari pusat secara langsung melalui Dinas Sosial.

Untuk memperkuat pendapatnya Hadaya maka peneliti melanjutkan penelitian dengan mewawancarai Abdulrahman selaku ketua RT 02 Kelurahan Tamangapa menyatakan bahwa:

> Kalau data keluarga miskin ada di RW. Saya perna dengar program bantuan-bantuan sosial itu, tetapi kurang tahu programnya karena pada saat didata, saya cuma kasih tahu kalau warga saya yang ini miskin dan kurang mampu. Terus pendataan selama ini mereka hanya minta data begitu-begitu saja ji’

wawancara lanjut dengan Paris ketua RW 04 Kelurahan Tamangapa, menjelaskan bahwa:

> Kalau untuk rekrut data saya kurang tahu juga karena namanya data itu dari atas. Kayanya tidak kerja sama dengan kami karena saya juga tidak tahu datanya dari mana. Mungkim mereka ambil datanya dari sensus ekonomi atau lainnya. Karena dari kami tidak mungkin saya kasih masuk nama anak yang tidak sekolah lagi, buktinya ada yang tidak sekolah tapi juga mendapat kartu KIP. Untuk program PKH juga saya tidak tahu datanya ambil dari mana karena hanya 10 KK yang menerima bantuan itu. Saya hanya menerima laporan kalau ini warga ta' yang menerima PKH. Dan PKH yang menyusul 70 KK lagi, dan itu juga saya tidak tahu datanya dari mana.

Paris kembali menegaskan bahwa data penerima bantuan tersebut tidak tahu diambil dari data sensus yang mana. Karena kenyataan anak yang tidak sekolah lagi masih ada nama pada daftar penerima kartu KIP. Selain itu ada pula warga yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Selama ini data penerima bantuan itu langsung dikirim dari pusat melalui tim pendata daerah. Namun nyata bahwa kurangnya koordinasi dan kerja sama yang baik antara tim pendata dari kantor dinas sosial dengan pihak Kelurahan/ RW/RT sehingga data yang terkafer tidak rill.

Selaku masyarakat penerima bantuan juga memberikan keterangan yang sama mengenai data dan verifikasi data. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Syki, Ali, Masita, Disaro, Marni, Dnai, Naharia, secara keseluruhan mereka menyatakan bahwa "kami belum menerima bantuan karena belum terdaftar dalam penerima bantuan padahal sudah melapor ke RT". Warga tersebut berdomisili di Kota Makassar lebih dari 10 Tahun, ada pula penduduk asli yang hampir 50 Tahun tinggal di Kota Makassar, namun kenyataan mereka belum mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah. Memang kenyataan banyak warga pula yang belum memiliki KTP dan KK, mereka pula belum melapor ke RT/RW, dengan alasan bahwa mereka tidak tahu caranya untuk memperoleh kartu-kartu penduduk

tersebut. Padahal mereka telah tinggal bertahun-tahun dari orang tuanya sampai sekarang sudah memiliki cucu. Keterangan lain yang di dapatkan adalah bahwa mereka memang pendatang dan memiliki kartu penduduk daerah asal tetapi KTP dan KK tidak punya karena rasanya sulit untuk mengurus dan tidak tahu cara mengurusnya.

Naharia memberikan penjelasan dan keterangan lain terkait pendataan, melalui Hasil wawancaranya menyatakan bahwa:

> Pendataan selama ini kita tidak ketahui, karena selama ini yang ada katanaya rahasia dan tidak perna mereka bilang kalau data ini untuk dapat bantuan. Kalau ada yang sudah dapat bantuan baru ada yang penasaran dan tanya, kapan itu di data? Kenapa kami tidak dapat? Itu kan pendataan yang tidak rill.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa data masyarakat yang selama ini diambil, belum secara keseluruhan mengakomodir semua masyarakat miskin secara keseluruhan di Kota makassar. Dengan alasan bahwa tenaga TKSK yang disiapkan tidak mampu mendata dan mengakomudir semua warga masyarakat di setiap kecamatan karena keterbatasan jumlah anggotanya. Selain itu, data tersebut tidak riil sesuai dengan kenyataan dilapangan. Nyatanya ada warga yang seharusnya tidak lagi berhak mendapat bantuan karena sudah meninggal tetapi masih memiliki nama sebagai penerima bantuan sosial. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kerja sama yang baik antara tim pendata dengan pihak kelurahan dalam hal ini RW dan RT.

2) Sistem Sosialisasi dan Informasi

Dalam suatu program atau suatu kegiatan yang jelas dibutukan suatu sistem sosialisasi ataupun informasi yang jelas tentang program tersebut. Hal ini

dilakukan dengan maksud untuk menghindari yang namanya ketidakjelasan, serta terjadinya transparansi terhadap suatu program. Namun kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial adalah sistem informasi dan sosialisasi yang putus. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Nadira menyatakan bahwa "Sosialisasi dan penyuluhan sering dilakukan namun tidak efektif karena kurangnya pengetahuan masyarakat miskin. Adapun sosialisasi selama ini dilakukan di kantor dan menghadiri adalah dari semua kelurahan".

Nadira sangat jelas menjelaskan bahwa memang sosialisasi perna dilakukan namun rasanya tidak efektif, hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang kurang pengetahuan sehingga kurang mencerna informasi yang diterima selama ini. Memang sosialisaasi juga dilakukan di setiap kelurahan namun sama belum efektif. Hal yang sama juga di tambahkan oleh Ghalib bahwa memang selama ini sudah ada sosialisasi ke penerima manfaat, dan itu dilakukan rutin.

Sedangkan wawancara lanjut dengan La Heru, menyatakan bahwa selama ini kami melakukan monitoring dan kontrol di lapangan terhadap program yang dijalankan dan itu dilakukan dengan sangat profesional. Dari segi pemerintah, dalam hal ini anggota dewan juga berperan langsung dalam hal kontrol. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Mario David, menyatakan bahwa "kami Anggota Dewan selama ini sering melakukan Reses dan Sidak ke beberapa tempat dianggap rawan kemiskinan".

Sosialisasi memang sering dilakukan oleh banyak lembaga dan bidang tentang program-program kesejahteraan sosial tersebut namun kenyataan lain dari yang diinginkan. Hal tersebut dikemukakan oleh Hadaya bahwa:

> Memang banyak lembaga yang sering sosialisasi tetapi namanya merubah itu dari dalam. Dan semua itu karena kelalaian mereka sendiri. Selain itu, selama ini memang pemerintah daerah sering turun memantau lokasi atau masyarakat itu.

Upaya melalui sosialisasi resmi telah dilakukan oleh petugas secara rutin namun karena keterbatasan pengetahuan dari masyarakat tersebut sendiri yang mengakibatkan putus informasi. Sebagai perpanjangan tangan dari pihak kelurahan yaitu RT dan RW juga memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam memberikan informasi lanjut kepada masyarakatnya. Namun kenyataan, sesuai hasil wawancara dengan ketua RT 02 Abdulrahman bahwa "Perna ada sosialisasi program di kantor lurah, tapi kadang saya ikut dan juga tidak, lagian faktor orang tua jadi suka lupa".

Selanjutnya Paris selaku ketua RW 04 juga memberikan penjelasan bahwa:

> Setahu saya sosialisasi biasanya lewat radio atau televisi. Kalau sosialisasi langsung itu perwakilan dari RT/RW baru kami yang lanjutkan ke masyarakat. Saya memang kadang turun lanjutkan sosialisasi ke masyarakat, dan selama ini kalau ada masalah baru turun. Selama ini saya juga tidak kumpul masyarakat, dan kalau ada program saya langsung ke rumah saja. Selain itu kalau ada bantuan raskin sering saya informasikan ke masyarakat kalau sudah ada raskin.

Ketua RT dan RW diharapkan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah terutama dalam memberikan informasi lanjut kepada masyarakat, ternyata belum menjalankan tugasnya secara optimal, dengan alasan karena faktor orang tua. Informasi dilanjutkan ke masyarakat apabila mereka anggap hal itu

sangatlah mendesak atau penting. Yang mereka pikirkan adalah nantinya masyarakat mencari informasi sendiri baik lewat media umum atau media sosial.

Masyarakat setempat memberikan keterangan juga terkait informasi dan sosialisasi yang mereka terima selama ini. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Syki, Ali, Masita, Disaro, Marni, Ace, dan Naharia. Pernyataan umum yang mereka utarakan adalah, mereka tidak perna tahu kalau ada sosialisasi dari pemerintah atau dari RT/RW karena aktifitas mereka keseharian adalah mengulung. Alasan mereka tidak perna mendapat bantuan karena tidak ada petugas yang memberi tahu bagaimana caranya memperoleh KTP dan KK. Karena satu syarat utama untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah harus memiliki kartu penduduk tersebut. Adapula yang memberikan keterangan bahwa, mereka tidak mengetahui apapun tentang macam-macam bantuan baik melalui media sosial maupun media massa karena kami tidak miliki semua itu. Hasil keterangan seorang ibu bahwa, memang perna ada rapat RT tetapi mereka tidak mengikuti rapat tersebut karena lebih memilih pergi mengulung untuk memperoleh uang. Naharia, dalam penjelasannya menyatakan bahwa:

> Setahu saya dikelurahan tidak ada sosialisasi bantuan dari dinas sosial, kecuali dari PNPM itu juga memilih yang mana yang harus dapat. Baru tahun ini ada informasi dari dinas sosial untuk semua masyarakat memasukan data KTP dan KK ke kantor Dinsos.

Berdasarkan hasil penelitian maka, jelas bahwa sistem sosialisasi dan informasi yang terjadi tidak berujung pada suatu pemahaman yang baik tentang program-program kesejahteraan sosial. Dengan alasan bahwa banyak warga yang kurang memahami apa yang disampaikan dan apa yang diharapkan dari program tersebut. Kurang pemahaman tadi dikarenakan keterbatasan pengetahuan dari

masyarakat itu sendiri. Selain itu, petugas RT/RW sebagai perpanjangan tangan dari pihak pemerintah juga belum melaksanakan tugas mereka secara optimal, informasi diterima namun sayangnya tidak melanjutkan ke masyarakatnya. Hal itu yang membuat warga masyarakat selalu acuh dan masa bodoh serta tidak perduli dengan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Akibat kurangnya pemahaman, maka, muncul ketidakperdulian masyarakat terhadap program-program sosial pemerintah itu sendiri.

3) Politik

Politik disadari sungguh bahwa sangat mempengaruhi banyak hal, termasuk program-program pemerintah. Hal tersebut banyak dirasakan langsung oleh masyarakat yang selalu menjadi korban dari politik. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ghalib, menyatakan bahwa:

> Partisipasi langsung pemerintah langsung terhadap program bantuan sosial selama ini hanya lewat pemantauan. Pada saat ingin memberikan bantuan, para anggota dewan menelpon atau memberi tahu kalau pa, nanti kasih juga bantuan ke keluarga-keluarga ini dan ini ya? Alasannya karena di situ areal pemilihan mereka.

Ghalib memang mengakui bahwa selama ini ada partisipasi langsung pemerintah daerah dengan Dinas Sosial dalam hal bantuan dan program kesejahteraan sosial. Realitanya adalah unsur politik berbaur kebijakan, dimana bantuan diberikan harus mempertimbangkan kepentingan, kemana dan siapa yang harus diberikan bantuan itu. Tidak semua sasaran utama tetapi orang-orang hkusus yang menjadi prioritas pemerintah karena merekalah kekuatan politik.

Selaku pemerintah daerah dalam hal ini anggota DPRD komisi D bagian Kesra yaitu Mario David juga memberikan keterangan yang sama melalui wawancara, menjelaskan bahwa:

> Dalam pendataan tidak boleh ada interfensi politik. Biasanya orang yang miskin dipolitisasi, misalnya RT/RW melakukan interfensi politik, dimana biasanya kamu adalah pemilih wali kota A dulu dan apabila pemilih yang masuk ke calon yang kalah maka dia tidak terverifikasi oleh RT/RW dan atau sebaliknya karena dia barisan saya maka masuk dalam data.

Sangatlah jelas bahwa dalam sistem pendatan maupum pemberian bantuan ada yang namanya interfensi politik. Hal itu dirasakan oleh masyarakat kecil yang selalu tidak tahu yang menjadi korban politisasi dari penguasa. Peran RT dan RW sangatlah penting dalam hal tersebut, apabila mereka mengikuti perintah atau arus politik yang sementara bergulir maka itu yang akan terjadi. Karena RT/RW yang sangat mengetahui lebih mendalam kondisi warga mereka. Siapa yang pantas dan siapa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Kondisi tersebut diberi keterangan oleh Naharia adalah seorang warga setempat melalui wawamcara bahwa "tidak ada RW/RT yang baik hati, paling-paling keluarganya yang diutamakan", hal demikianlah yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa politik juga mempengaruhi program kesejahteraan sosial. Hal tersebut terbukti melalui sistem pendataan maupun pemberian bantuan. Seharusnya menjadi prioritas adalah masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan dianggap berat dan mendesak namun dengan adanya interfensi politik maka pemberian bantuan diberikan kepada kalompok khusus yang menjadi prioritas pribadi.

4) Anggaran

Anggaran merupakan suatu unsur utama dalam segala kegiatan atau program apapun. Pengaruhnya sangat terasa, karena tanpa sistem penganggaran yang baik dan cukup, mana mungkin suatu program berjalan dengan baik. Kondisi ini dirasakan dalam sistem pengganggaran pusat sampai daerah terhadap program-program kesejahteraan sosial. Program yang dijalankan selama ini banyak mengalami kendala dan boleh dapat dikatakan belum mencapai target yang diinginkan bersama. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang terbatas baik dari APBN maupun APBD. Hal ini dijelaskan oleh Ghalib dalam wawancaranya bahwa:

> Selama ini Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program, apabila pusat kekurangan anggaran maka daerah membantu menganggarkan. Selanjutnya, memang program-program sudah berjalan optimal namun masih ada gejolak-gejolak yang terjadi karena banyak keluarga sedangkan kekurangan anggaran, maka bantuan diberikan bertahap kepada penerima manfaat. Kita mau untuk membantu semua masyarakat yang miskin tapi kekurangan anggaran itu yang tidak mampu mengkafer semua.

Anggaran yang dianggarkan untuk program kesejahteraan sosial itu bersumber dari APBN dan APBD. Namun sesuai dengan keterangan Ghalib bahwa itu masih belum cukup mengkafer semua manyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Dengan itu maka sistem pemberian bantuan dilakukan secara bertahap. Hal tersebut juga ditegaskan oleh La Heru bahwa anggaran selama ini memang dari pusat tetapi dalam bentuk seri, dan apabila kekurangan maka pemerintah daerah yang menambah dana tersebut untuk program-program kesejahteraan sosial tadi. Selain itu laheru juga menberikan keterangan bahwa:

> Program PKH jumlah anggarannya 20 M dari Kemensos, untuk program KIS/KIP dan KKS itu berupa kartu, semua berasal dari Kemensos sedangkan bantuan Raskin/restra itu dananya bersumber dari pusat dan dana daerah. Daerah menganggarkan untuk raskin sebesar kurang lebih 900 juta/ Tahun untuk 50.527 kepala keluarga.

Mario David juga memberikan penjelasan yang tegas terhadap sistem penganggaran bantuan kesejahteraan sosial bahwa:

> Apabila ada kekurangan dana dari pusat, maka daerah akan membantu, dan ini memang program terkait dari pusat yang sistem pendanaan dari APBN dan APBD. Program- program sudah terlaksana namun belum baik, akibat masih kekurangan anggaran. Idealnya adalah satu orang per kelurahan, karena realititanya data di dalam kota belum valid sekitar 60% dan semua itu kendalanya di anggaran dari Pemerintah Daerah. Besar anggaran untuk kesehatan dari daerah sebesar 42 M, untuk bantuan hukum 1 M dan untuk raskin 1-2 M. tetapi kendala terbesar Pemerintah Daerah adalah belum mencapai target dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk program PKH itu program nasional, namun kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerh terkait anggaran, misalnya mempersiapkan keluarga penerima harus rill, tetapi nyatanya apabila tenaga yang mendata hanya 14 orang maka jelas tidak efektif.

Dampak dari kurangnya anggaran tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat penerima bantuan. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Abdulrahman selaku ketua RT menjelaskan bahwa “kemiskinan di sini kerena kurang modal, bukan karena malas. Banyak tenaga kerja tapi tidak punya modal dan lapangan pekerjaan”. Selanjutnya Paris, memberikan keterangan lanjut bahwa “Yang menjadi kendala sekarang ini KIP belum cair dananya, saya tidak tahu alasannya. Memang dananya dari daerah, ada keluarga yang datang mengeluh ke saya katanya dananya KIP belum cair ni, tidak tahu kenapa”.

Senada dengan Paris, maka Naharia juga memberikan keterangannya bahwa:

> KIP kalau sekarang ada kartunya tetapi tidak menikmati uangnya. Anak saya yang kelas 1 perna dapat beasiswa Rp. 200.000 di awal Tahun 2016

> sampai sekarang belum ada. Memang ada info bahwa harus laporkan ke sekolah, lalu kita lapor namun sampai sekarang kita belum dapat uangnya, tidak tahu bagaimana modelnya.

Sistem pengganggaran dan keterbatasan anggaran berdampak langsung kepada jalannya program. Diketahui bahwa, karena kekurangan anggaran maka bantuan sosial diberikan secara bertahap atau secara seri. Tidak mungkin semua keluarga miskin diberikan sekaligus dalam satu tahap dengan anggaran yang terbatas. Hal lain juga dirasakan oleh penerima bantuan, dimana mereka telah terdaftar sebagai penerima manfaat namun sistem pemberian bantuan tidak konsisten. Hal keuangan juga berdampak pada penyediaan tenaga TKSK yang digunakan sebagai pendata oleh Kemensos. Setiap anggota ditempatkan di satu Kecamatan, yang idealnya satu kelurahan satu orang, namun karena kondisi anggaran yang terbatas maka tenaga juga dibatasi.

b. Faktor Internal

Selain faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program pemerintah, ada pula faktor lain yang berpengaruh dari dalam diri masyarakat miskin itu sendiri, yaitu pendidikan dan pekerjaan. Untuk lebih jelas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendidikan

Standar pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tentang sesuatu yang didengar dan dilihat. Nyatanya bahwa apabila seseorang memiliki pengetahuan yang kurang maka jelas dia juga memiliki penalaran dan pemahaman terhadap sesuatu itu berkurang pula. Banyak program

yang rencanakan dan dilakukan oleh pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial. Program tersebut dijalankan dengan sistem yang terarah dan berfokus. Selain itu, yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam memberikan pemahaman dan pandangan-pandangan terkait program-program yang direncanakan tersebut, namun usaha itu banyak mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil waawancara dengan Ghalib menjelaskan bahwa "Alasan utama kemiskinan adalah karena pendidikan rendah dan SDM yang kurang, yang sulit untuk memahami apa yang diinginkan pemerintah dan apa yang di inginkan program".

Glalib menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia yang kurang sangatlah berpengaruh terhadap pemahaman tentang sesuatu. Pemerintah memprogramkan dan mengharapkan yang terbaik untuk masyarakatnya namun karena keterbatasan itu maka tidak berujung keberhasilan. Hal yang sama di pertegas lagi oleh La Heru, bahwa faktor utama terjadinya miskin karena masyarakat pasif atau tidak peduli dengan program yang ada, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program.

Hadaya dalam hasil percakapannya menjelaskan bahwa pada umumnya masyarakat yang ngulung itu tingkat pendidikanya rendah, karena kebiasaan dari kecil kerja sedikit langsung dapat uang. Karena mereka berpikir apabila ke sekolah tidak menghasilkan uang, lebih baik pergi ngulung. Dengan keterangan tersebut serta hasil penelitian bahwa rata-rata orang yang kurang mampu dan miskin itu terbatas pendidikannya.

Secara jelas kita ketehui kemampuan dan pengetahuan masyarakat miskin tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Syki, Ali, Disaro, Marni,. Dalam keterangan menjelaskan bahwa mereka orang miskin memang cari hidup susah, karena pendidikan yang mereka miliki juga kurang jadi, sudah cukup untuk bisa mengulung saja. Adapula yang memberikan keterangan bahwa "kami tidak perna mendapat bantuan apapun karena saya kan buta huruf jadi tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan". Selain itu adapula warga yang merasa malu jika apabila tidak mendapat bantuan dari pemerintah, dibiarkan begitu saja karena mereka juga tidak mengetahui cara untuk memperoleh bantuan tersebut. Selain itu, Dnai dalam hasil wawancaranya memberikan keterangan bahwa;

> Dulu anak saya yang cewe sekolah, tetapi sekarang tidak lagi karena bantu ngulung, biasanya keluar jam 8 pulang jam 2-3 malam. Ya, dia rasa nyaman karena cepat dapat uang. Kerja ngulung ni bagus ki' dari pada di kebun, karena di kebun banyak pengeluaran dibandingkan penghasilan.

Anak dan orang tua lebih memilih pergi ngulung dari pada ke sekolah. Karena beranggapan bahwa perkerjaan yang mereka lakukan sekarang cepat dan gampang untuk menghasilkan uang. Orang tua tidak mampu mempengaruhi anaknya untuk pergi ke sekolah karena memiliki pandangan dan pemahaman yang terbatas terhadap pentingnya pendidikan itu sendiri. Hal itu dijelaskan oleh salah seorang warga yang cukup luas wawasannya yaitu ibu Naharia, bahwa masyarakat di sekitar TPA sangat kurang pemahamannya sehingga malas menyekolahkan anak-anak mereka. Selain itu, apabila mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah pada masa bodoh saja karena mengulung adalah prioritas hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan maka, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan berpengaruh langsung terhadap program kesejahteraan sosial. Dimana, dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin tersebut maka berdampak akan kurangnya pemahaman terhadap program tersebut. Serta kurang menyadari akan pentingnya suatu program yang diprogramkan oleh pemerintah dan beranggapan bahwa program tersebut kurang penting bagi mereka. Pola pikir masyarakat miskin adalah bekerja saja untuk mendapatkan uang dan tidak perlu menyekolakan anak.

2) Pekerjaan

Rasa nyaman terhadap sesuatu akan berdampak pada perubahan dan perkembangan. Hal ini juga terlihat dalam suatu pekerjaan, apabila seseorang mengerjakan sesuatu dan merasa nyaman terhadap apa yang didapatkan atau yang dihasilkan maka dia akan malas untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Hal ini terbukti melalui hasil wawancara dengan masyarakat sekitaran TPA yang notabene pekerjaan utamanya adalah mengulung. Hal itu juga dikemukakan oleh ketua RT tentang pekerjaan utama warganya, yaitu menurut Abdulrahman penduduk disekitar TPA kurang lebih 80% miskin, dan pekerjaannya adalah tukang batu, tukang sayur, tukang bangunan selain itu banyak yang mengulung.

Rasa kepuasan terhadap pekerjaan mengulung itu muncul melalui hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan Syki, Ali, Masita, marni, Dnai, ace. Secara keseluruhan menjelaskan bahwa mereka merasa lebih nyaman dengan pekerjaan mengulung dari pada pekerjaan lain. Ada pula yang memberikan keterangan bahwa “saya biar kerja ngulung saja yang penting hidup”. Hal itu

menunjukan bahwa mereka pasrah kepada apa yang mereka kerjakan sekarang yang penting bisa bertahan hidup. Keterangan lanjut diberikan oleh seorang ibu bahwa dia lebih nyaman tinggal di situ karena orang tuanya dari dulu sampai sekarang tinggal di situ, dan apabila pemerintah menyuruh keluar dari tempat itu maka dia lebih memilih tetap dari pada keluar. Ada warga yang mengulung dari kecil, dan merasa begitu nyaman dengan pekerjaan tersebut. Mungkin kita berpikir bahwa pekerjaan lain banyak diluar sana yang layak bagi mereka tetapi kita jangan salah kapah, karena pekerjaan mereka merupakan budaya yang sulit untuk dirubah. Ada pula warga yang memberikan keterangannya bahwa kami lebih memilih mengulung dari pada berkebun, karena mengulung langsung dapat uang, sedangkan kalau kebun besar pengeluaran dari pada penghasillan.

Mata pencaharian atau pekerjaan utama masyarakat miskin di daerah kota Makassar adalah buru kasar atau sebagai pengulung. Pekerjaan itu bagi mereka sangat baik dan nyaman untuk dikerjakan. Karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman yang mereka miliki maka selalu menerima kenyataan hidup bahwa apa saja pekerjaan yang mereka kerjakan sekarang, yang penting halal dan mampu melangsungkan hidup. Masyarakat demikian sangatlah merasa puas dengan pekerjaan tersebut. Dengan kondisi yang demikian maka untuk merubah pola pekerjaan dan kehidupan mereka membutukan strategi yang sangat tepat. Dengan kondisi demikian, maka masyarakat miskin tersebut tidak memperdulikan dengan segala sesuatu yang ada di luar seperti bantuan ataupun program-program pemerintah lainnya.

C. Strategi yang dilakukan untuk Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin di Kota Makassar

Sistem penyelenggaraan kesejahteran sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin adalah melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Untuk itu, pemerintah daerah kota Makassar melakukan berapa upaya, sesuai dengan hasil wawancara dengan Nadira, menyatakan bahwa:

> Kami dari dinas sosial selama ini telah banyak berupaya mengurangi kemiskinan di kota Makassar melalui, sosialisasi, penyuluhan dan kontrol. Ada juga upaya lain yaitu adanya mobil patroli sari batang yang akan memungut anak jalanan dan orang tua, mereka di antar ke panti jompo dan panti asuhan.

Cara yang dilakukan oleh Dinas Sosial bagian UKM tersebut dirasakan cukup membantu masyarakat dan mampu mengendalikan anak-anak jalanan dan orang tua yang ada di sekitaran Kota Makassar. Pengadaan mobil patrol sari batang tersebut untuk mengangkut anak-anak jalanan yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, meraka akan diangkut ke panti asuhan yang telah disediakan, lokasinya di Kabupaten Maros. Hal yang sama juga dilakukan untuk orang tua yang ditemukan di pinggiran jalan. Mereka juga akan diangkut dan diantar ke panti-panti jompo yang telah disiapkan pemerintah. Strategi tersebut dilakukan dengan maksud bahwa anak jalanan dan orang tua yang mengalami masalah kesejahteraan sosial tersebut harus mendapatkan pelayanan dan perhatian khusus.

Dilain sisi, pemerintah telah merencanakan dan melaksanakan program demi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Hal itu dilakukan berdasarkan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mario David menjelaskan bahwa, program pemerintah untuk menangulangi masalah kesejahteraan masyarakat miskin salah satunya adalah pembangunan rumah susun untuk keluarga miskin.

Rumah susun tersebut dengan sistem pembayarannya Rp. 150.00/Bulan untuk biaya operasional. Lebih lanjut, Mario mennyatakan bahwa, strategi tersebut sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal mengurangi beban pengeluaran bulanan. Pembangunan rumah susun telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar, dan program itu telah dirasakan langsung oleh sebagian masyarakat miskin dengan harga yang murah terjangkau. Selanjutnya Mario memberikan penjelasan bahwa program tersebut akan berkelanjutan dan akan dibangun lagi beberapa rumah susun di berapa titik rawan kemiskinan.

Banyak strategi telah dilakukan dan dijalankan demi kesejateraan sosial masyarakat miskin di kota Makassar, namun dilain sisi program tersebut diperlukan pengawasan dan kontrol yang baik demi keberlangsungan program yang baik dan terarah. Hal tersebut dijelaskan oleh La Heru, dalam hasil wawancaranya menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan adalah “kami melakukan sistem program, melakukan monitoring, bimbingan dan tindak lanjut serta evaluasi program”.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini, akan dianalisis permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan program kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin, faktor determinan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial serta strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kota Makassar.

1. Penerapan Program Kesejahteraan Sosial terhadap Masyarakat Miskin

Kebijakan sosial merupakan suatu mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat agar dapat mencapai hasil yang mereka inginkan dimana di dalamnya ada keterkaitan antara obyektif dan tujuan masyarakat yang dicapai melalui cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang dominan di masyarakat tersebut. Interfensi kebijakan sosial pemerintah melibatkan lembaga Legislatif (sebagai pihak yang membuat kebijakan sosial) mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki masyarakat guna mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Dengan itu, maka ditetapkan beberapa program pemerintah demi pencapaiaan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial yang dimaksudkan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, untuk itu pemerintah berupaya untuk memenuhi hak tersebut dengan berbagai upaya dan kebijakan, dengan itu diperlukan suatu perencanaan yang matang untuk mencapai suatu perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan maju serta lebih baik dari

kondisi sebelumnya. Perubahan yang menjadi harapan adalah perubahan yang diinginkan demi terpenuhinya berbagai hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat yang kurang mampu atau miskin, melalui campur tangan dari pihak luar terutama pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Perlu disadari bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk menjamin dan melindungi warganya melalui sistem hukum, serta menyediakan pelayanan sosial dasar guna memenuhi hak-hak penduduknya. Disisi lain, keluarga dan masyarakat juga merupakan pemangku kewajiban yang memiliki tugas dan tanggung jawab memenuhi hak-hak para anggotanya. Hakikat kewajiban negara terhadap warganya perlu dijelaskan bahwa pengamatan terhadap praktek selama ini menunjukan bahwa kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya dan komitmen penentu kebijakan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat demi pencapai kesejahteraan sosial, maka dikeluarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010. Maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang memiliki mandat utama yaitu untuk meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan. TNP2K membentuk dan menerapkan beberapa program kesejahteraan sosial yang menjadi priorotas Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Raskin/Rastra.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan yang ingin menyekolakan anaknya secara gratis. Tujuan dari program ini adalah untuk menghilangkan hambatan anak usia sekolah secara ekonomi untuk berpartisipasi disekolah, mencegah anak mengalami putus sekolah karena ekonomi, membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran serta mendukung penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Program KIP diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementrian Agama, dimana kartu tersebut berfungsi sebagai penerima bantuan dana pendidikan untuk siswa miskin, caranya dengan menunjukan kartu KIP kepada pihak sekolah swasta atau negeri. Kartu tersebut bisa digunakan untuk mengganti biaya pendidikan. Dana yang diberikan untuk siswa sekolah dasar sebesar Rp. 225. 000/ semester, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp. 375. 000/ semester, dan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp. 500. 000/ semester.

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) memberikan jaminan pada pemegangnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan dari KIS adalah untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. Selain itu, fungsi dari KIS adalah untuk membantu masyarakat miskin yang saat berobat ke rumah sakit, dengan kartu tersebut masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas atau rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pemerintah setempat. Sedangkan cara pembuatan kartu KIS tidaklah berbeda dengan JKN, karena KIS tidak menggantikan JKN. Bahkan para anggota JKN akan memegang KIS akan mendapatkan sejumlah benefit. Untuk biaya KIS

sama jumlahnya dengan JKN, dimana terbagi atas 3 kelas yaitu kelas I dengan harga Rp. 59. 500, kelas II Rp. 42. 500, dan kelas III Rp. 25. 500, dengan itu masyarakat akan membayar sesuai kelas mana dan kesanggupan mereka membayar premi tersebut

Selanjutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat yang sangat miskin melalui pemberian insentif. Pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan PKH adalah Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) pusat, UPPKH Kabupaten/ Kota, dan pendamping PKH. UPPKH pusat merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program sekaligus melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta pengendalian bantuan yang dibutuhkan. UPPKH kabupaten/ kota melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancer. Selain itu, berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberikan bantuan jika diperlukan. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota. Tugas pendamping juga melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pendampingan kepada para penerima manfaat.

Sedangkan, program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai pengganti KPS yang berfungsi sebagai penanda bahwa sipemegang kartu tersebut berhak menerima bantuan uang dari pemerintah. Kartu KKS diberikan dalam bentuk SIM Card, dimana dalam penggunaannya penerima dapat memasang pada Handphon untuk mengecek saldo. Proses pembuatan kartu KKS, bagi mereka yang tidak memiliki KPS maka segera ke kantor pos membawahkan KTP dan Kartu keluarga untuk diverifikasi dan akan mendapatkan KKS. KKS merupakan program Kemensos yang diprioritaskan kepada warga yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan lain sebagainnya. Anggaran yang digunakan untuk program ini bersumber dari Kementrian sosial, yang dikelola oleh bendahara Negara sebesar Rp. 6,4 Triliun.

Sedangkan program Raskin (Beras Miskin) merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menberikan perlindungan pada keluarga melalui distribusi beras bagi keluarga miskin. Distribusi beras sebanyak 156 Kg/ RTS/ Tahun atau 13 Kg/ Bulan dengan harga Rp. 1. 600/Kg. Kepala desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa dan keluarahan dalam hal pendistribusian raskin dan penyelesaian pembayaran serta administrasi diwilayahnya. Untuk pelaksanaan distribusi raskin dapat melalui kelompok kerja, warung desa maupun kelompok masyarakat. Pembiayaan subsidi raskin disediakan oleh pemerintah dalam bentuk subsidi pangan. Biaya operasional dari titik distribusi sampai rumah tangga sangat miskin menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota dan beban Perum Bulog. Untuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit pengaduan

Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung tim koordinasi raskin pusat sampai daerah menjadi beban APBN/ APBD dan atau operasional Perum Bulog.

Program-program kesejahteraan social tersebut dalam pelaksanaannya mendapat pengawasan langsung baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan program-program sosial tersebut diatas, terdapat tim koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat Provinsi dan PT pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung. Setiap program adanya pendampingan yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Selain itu, tugas pendampingan adalah melakukan sosialisasi, pengawasan dan pendampingan kepada para penerima manfaat dalam memenuhi hak-hak mereka.

Selain program tersebut, ada pula program lain yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar adalah berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah telah mensubsidi kesehatan dan raskin untuk masyarakat yang tidak mampu dengan mengaplot dana yang besar untuk program-program tersebut. Selain itu, program lain yang dilakukan oleh bagian UKS dan bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial adalah program yang berfungsi sebagai stimulan seperti Usaha Ekonomi Lorong yang di prioritaskan untuk kelompok maupun individu. Bantuan hukum juga telah disediakan pula oleh pemerintah daerah kota Makassar bagi masyarkat miskin yang berperkara. Dengan adanya

program tersebut maka, dapat mengurangi beban hidup masyarakat kurang mampu.

Program-program tersebut telah diterapkan dan dilakukan oleh pemerintah, dengan maksud untuk mencapai target yang diharapkan yaitu pemerataan kesejahteraan sosial bagi semua penduduk. Namun kenyataan dilapangan masih terdapat kesenjangan dimana program belum terrealisasi secara merata dan dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, dimana bantuan yang masyarakat terima selama ini bukan hanya bantuan langsung dari pemerintah melainkan dari kelompok atau lembaga sosial masyarakat serta bantuan dari individu. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan program yang belum baik sesuai jalurnya.

Sesuai hasil observasi dilapangan, bahwa masih ditemukan warga yang kondisi perumahannya tidak layak dihuni. Rumah berlantai tanah, beratap seng, berdinding tripleks/daun seng serta tidak memiliki perlengkapan rumah yang lengkap. Selain itu, hubungan sosial kemasyarakatan juga kurang terjalin dengan baik, dimana ditemukan keluarga yang pada saat hari raya tidak menikmati dengan nyaman bersama keluarga dan tetangga, karena kondisi kehidupan dan keterbatasan yang mereka miliki yang membuat mereka tidak berdaya.

Perasaan terhadap pemenuhan kebutuhan fisik, rasa aman dan tentram, dicintai dan disayangi, rasa dihargai itu juga dirasakan oleh masyarakat miskin. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan fisiklah yang paling utama dimana berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia seperti pemenuhan pangan, papan, sandang, gaji (pendapatan), kesehatan serta fasilitas lainnya. Namun

hampir sebagian besar rumah tangga miskin menyatakan bahwa kebutuhan keluarga belum tercukupi dari pendapatan yang ada saat ini. Apabila fisik sudah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan akan rasa aman dan tentram. Walaupun diakui bahwa anggaran terbesar dalam rumah tangga adalah untuk makanan, proporsi pengeluaran besar untuk makanan menurun dengan peningkatan pendapatan, sedangkan proporsi pengeluaran untuk barang-barang mewah bertambah dengan ketika pendapatan meningkat.

Ketika kebutuhan fisik akan makan, papan, sandang dan kebutuhan keamanan telah terpenuhi, maka seseorang balik ke kebutuhan berikutnya, yakni kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Dalam hal ini seseorang berusaha mencari teman yang sederajat dengan kedudukan sosialnya. Yang dimaksudkan bahwa adanya interaksi dengan lingkungan dimana dia tinggal, kebebasan melakukan aktifitas sosial, kesempatan yang diberikan untuk menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain serta dukungan dari keluarga.

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia, karena manusia sangat tergantung dengan ketersediaannya. Hak atas pangan melambangkan kesadaran yang tinggi tentang peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Sebagai hak dasar manusia, hak atas pangan tidak boleh diabaikan, sama halnya dengan hak hidup, hak atas pangan merupakan hak yang tidak dapat diahlikan dalam kondisi apapun. Karena hak pangan berkaitan erat dengan standar kehidupan yang layak.

Kesejahteraan secara fisik dengan merujuk pada teorinya Muhtaj (2013: 141) yang menyatakan bahwa hak perumahan merupakan konstruk terpenting dalam mengokohkan terpenuhinya hak ekonomi sosial dan budaya. Hak atas

perumahan merupakan upaya nyata bagi terjamin dan terpenuhinya hak hidup yang layak. Dengan kata lain, hak perumahan merupakan hak esensial yang dapat memperkuat terpenuhinya hak-hak fundamental lainnya, seperti hak pangan, kesehatan dan sebagainya.

Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian seseorang. Untuk itu, perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kebutuhan perumahan bukan hanya sebagai sarana kehidupan semata, tetapi lebih dari itu merupakan proses pemukiman manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya dan menempatkan jati dirinya.

Nampak secara jelas bahwa banyak masyarakat miskin belum mampu secara fisik dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap hari dengan mata pencaharian yang tidak menjanjikan. Keterbatasan penghasilan yang menjadikan masyarakat tidak juga mampu untuk berubah dari kehidupan sebelumnya, dengan menyekolakan anak-anak mereka atau memiliki tabungan untuk masa depan mereka. Ketidakmampuan juga terlihat pada hubungan sosial kemasyarakatan masyarakat miskin tersebut, dimana tidak terlibat dalam kegiatan sosial dilingkungan sekitar.

Berpatokan teori Notowidagdo (2016: 36) yang menyatakan bahwa sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Nampak bahwa masyarakat miskin kota Makassar belum mampu secara fisik maupun non fisik dalan memenuhi

kebutuhan dasar. Terlihat pada kondisi perumahan yang ditempati masih berlantai tanah, berdinding tripleks dan perlengkapan rumah yang serba kekurangan. Selain itu, keterbatasan yang dimiliki masyarakat miskin tersebut maka, mereka juga tidak mampu menyekolahkan anak mereka. Program-program yang tadinya merupakan upaya prioritas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin belum berujung pada kesejahteraan sosial.

Pemenuhan akan kebutuhan dasar masyarakat merupakan kewajiban Negara. Disebutkan dalam Deklarasi Universal HAM pasal 25 ayat 1 menyatakan "setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya" . Kovenan Internasional hak-hak Ekonomi, sosial, Budaya, (Ekosob) Pasal 11 menyatakan "Negara-negara mendatangan Kovenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan perumahan….".

Dalam konstitusi Indonesia, hak-hak atas standar hidup layak telah diakui sebagai HAM. Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 menyatakan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Serta Ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utu sebagai manusia yang bermartabat.

Sedangkan, konteks kesejahteraan terdapat dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, Negara mengembangkan sistem jaminan jaminan sosial

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 11 menyatakan "setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak". Hak-hak sosial di atas merupakan kewajiban Negara.

Kondisi kesejahteraan masyarakat miskin kota Makassar tersebut dengan merujuk pada konsep Hak Asasi Manusi (HAM) pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka, HAM tersebut belum terpenuhi secara merata, dengan melihat kondisi kehidupan masyarakat miskin yang berada di kota Makassar. Seyojyanya hak setiap warga negara harus dipenuhi demi meningkatkan harkat dan martabatnya, dimana hal tersebut merupakan kewajiban Negara dan pemerintah.

Disisi lain, prinsip-prinsip Deklarasi umum Hak Asasi Manusia (Deklarasi HAM) menyatakan bahwa hak asasi manusia itu tidak dibagi, diwakilkan, apalagi dirampas, karena hak terpilih dan memilih, hak berpendapat berserikat dan beraktualisasi merupakan instrument hak-hak dasar dan menjadi aset manusia untuk mendapatkan hak lainnya, yaitu hak konstitutif aspiratis. Hak-hak konstitutif aspiratif berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan hidup. Hak-hak itu berkaitan dengan kebutuhan akan pendidikan,

kesehatan, perumahan, sandang, pangan dan rasa aman. Hak konstitutif aspiratif ini mustahil dapat dipenuhi jika hak warga yang berpendapat dan dilibatkan dalam proses pembangunan tidak dipenuhi karena hak ini merupakan kewajiban Negara kepada warganya.

Banyak program dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tidak berujung kepada peningkatan kesejahteraan. Angka kemiskinan dan kesenjangan justru semakin meningkat. Di sisi lain upaya pemerintah maupun masyarakat sipil dalam mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan masih belum secara tajam memeriksa keberadaan hasil dan dampak terhadap penerima manfaat, terutama kaum marginal dan secara khusus kelompok-kelompok perempuan. Untuk itu, diperlukan mekanisme agar hak warga dalam memenuhi kesejahteraan sosial mereka dapat terpenuhi sekaligus penyesuaian dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dengan berpatokan pada teori-teori yang ada maka, dapat disimpulakan bahwa penerapan program kesejahteraan sosial masyarakat miskin di kota Makassar belum dilaksanakan dengan baik. Kondisi tersebut nampak dalam kehidupan masyarakat, dimana ketidakmampuan didalam memenuhi kebutuhan dasar serta pemberian bantuan oleh pemerintah yang belum menyeluruh ke semua masyarakat miskin. Dengan demikian, maka hak-hak sosial masyarakat miskin belum terpenuhi secara merata.

2. Faktor Determinan dalam Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin

Program-program pemerintah telah dilakukan demi memenuhi hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin, namun kenyataannya program tersebut belum terlaksana dengan baik dan belum terealisasi secara merata. Cara dan upaya yang dibangun demi pencapaian program namun di lapangan selalu mengalami hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya verifikasi data, sistem sosialisasi dan informasi, politik, anggaran, pendidikan dan pekerjaan.

Data merupakan hal yang paling mendasar dan penting dalam suatu program. Namun Data yang terkafer dalam data penerima bantuan kesejahteraan sosial di Kota Makassar belum rill sesuai dengan yang di harapkan. Kenyataan terdapat masyarakat yang belum terdata dalam semua program penerimaan bantuan baik dari pusat maupun di daerah. Hal ini dikarenakan Jumlah tenaga TKSK (Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Kota Makassar berkurang yakni satu orang untuk satu kecamatan. Dimana dalam hal pelaksanaan tugas jelas tidak efektif, karena tidak mampu mengkafer semua penduduk miskin di satu kecamatan.

Selain itu, Sosialisasi dan informasi yang baik dan jelas dalam suatu program atau suatu kegiatan itu sangat dibutukan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari namanya rahasia serta terciptanya transparansi terhadap suatu program. Namun kenyataan yang terjadi dalam program kesejahteraan sosial adalah sistem informasi dan sosialisasi yang putus. Dimana

banyak masyarakat tidak perna mengetahui program-program selama ini yang dilakukan pemerintah. Sosialisasi perna dilakukan, manun tidak sampai pada sasaran program, yaitu masyarakat penerima manfaat. Selain itu, pihak-pihak yang dipercayakan sebagai perpanjangan tangan juga belum melakukan tugas secara optimal.

Penyebab lain kemiskinan dalam penelitian ini adalah politik. dimana kekuasaan mempengaruhi banyak hal, termasuk program-program pemerintah itu sendiri. Hal tersebut banyak dirasakan langsung oleh masyarakat miskin di kota Makassar yang selalu menjadi korban dari politik. Sangatlah jelas bahwa, dalam sistem pendatan maupum pemberian bantuan ada yang namanya interfensi politik. Hal itu dirasakan oleh masyarakat kecil yang menjadi korban politisasi dari pada penguasa. Bantuan selama ini diberikan dengan tidak mempertimbangkan siapa yang pantas dan siapa yang harus diprioritaskan.

Hasil temuan ini di dukung dengan teori yang dikemukakan oleh Mattulada (1997: 131) bahwa kemiskinan disebabkan karena stuktural dimana terjadinya kemiskinan karena kelemahan atau kebobrokan stuktural, yang berada diluar kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk menghindari atau mengatasinya. Misalnya kekuasaan pemerintahan yang memiliki kekuasaan paksa dimana sering terjadi penyalagunaan kekuasaan seperti politik.

Penyebak kemiskinan akibat stuktural juga ditegaskan oleh Suharto (2009: 17) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah faktor stuktural yang menunjuk pada sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan orang atau kelompok orang menjadi miskin.

Serta, Bank Dunia dalam (Khomson 2015: 17) yang menyatakan bahwa penyebab kemiskinan karena tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance*).

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendapat tersebut diatas maka politik berdampak pada kebijakan program-program pemerintah itu sendiri. Dimana sistem yang tidak adil dan tidak sensitif berdampak langsung kepada masyarakat miskin yang selalu menjadi korban politisasi. Kondisi tersebut terlihat pada sistem pemberian bantuan yang tidak merata kepada masyarakat. Itu dikarenakan tata pemerintahan yang kurang baik, bersih dan adil. Hal tersebut diperkuat dengan teori Nasdian (2015: 101) yang menegaskan bahwa meskipun program pengembangan masyarakat berpotensi memberdayakan masyarakat lapisan bawah, tetapi potensinya tidak dapat diaktualisasikan dengan masalah stuktural. Dan hasil penelitian Nur Adna (2013:112) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya perhatian pemerintah setempat, yang diberikan kepada masyarakat terkesan hanya sekadar melaksanakan kegiatan tetapi tidak ada tindak lanjut.

Masalah kebijakan juga berdampak pada penetapan anggaran oleh pemerintah untuk program-program kesejahteraan sosial. Program yang dijalankan selama ini banyak mengalami kendala dan dapat dikatakan belum mencapai target yang diinginkan bersama. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dan sistem pengganggaran yang belum baik atau terarah sehingga banyak masyarakan miskin yang belum menikmati haknya secara meratah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori Todaro (1997) dalam (Wahid 2014 : 42) yang menyatakan bahwa penyebab kemiskinan antara lain perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, perbedaan kekayaan, sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia, perbedaan peranan sektor swasta dan negara, perbedaan struktur industri dan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi politik negara lain serta perbedaan pembagian kekuasaan, stuktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Berdasarkan pendapat diatas maka, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi di kota Makassar merupakan kemiskinan stuktural. Dimana, kemiskinan terjadi karena kebijakan pemerintah. Program-program kesejahteraan sosial direncanakan dan di lakukan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai yang diharapkan. Masalah kebijakan bukan hanya terkait keuanggan dan anggaran saja tetapi juga keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tidak mempertimbangkan kepentingan utama dari program tersebut, melainkan sebaliknya. Korban dari kebijakan tersebut adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari keterpurukan itu.

Selain faktor eksternal yang berpengaruh terhadap program-program pemerintah, ada pula faktor yang berpengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri. Ada dua faktor yakni pendidikan dan pekerjaan. Pemerintah memprogramkan dan mengharapkan yang terbaik untuk masyarakatnya, namun karena keterbatasan pendidikan maka tidak berujung keberhasilan. Dimana, kegagalan terjadi karena

masyarakat sendiri pasif atau tidak peduli dengan program yang ada, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya program.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Mattulada (1997: 131) bahwa penyebab kemiskinan adalah karena kebodohan, ketidakmampuan fisik atau mental (cacat) dan penyebab dari dalam kemampuan pribadi seseorang. Berdasarkan pendapat ini, faktor penyebab kemiskinan di kota Makassar adalah karena keterbatasan pengetahuan dari masyarakat miskin itu sendiri. Kondisi ketidakmampuan dari masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap program dan harapan pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial. Hal yang sama juga terjadi karena tidak mampu berbuat atau bertindak lebih dari kemampuan mereka.

Ketidakmampuan secara fisik dan mental pula berpengaruh terhadap pekerjaan yang dipilih. Rasa cinta terhadap sesuatu akan berdampak pada perubahan dan perkembangan. Hal ini terlihat dalam suatu pekerjaan, apabila seseorang telah lama mengerjakan sesuatu pekerjaan maka, rasa cinta akan pekerjaan itu dan sulit untuk mengerjakan pekerjaan lain, hal tersebut nampak pada masyarakat miskin itu sendiri. Dimana merasa nyaman dengan pekerjaan yang dikerjakan sekarang, yang dilakukan dengan gampang dan cepat memperoleh uang, ketimbang pekerjaan lain yang berat. Karena beranggapan bahwa belum tentu pekerjaan berat cepat menghasilkan uang. Persepsi yang sama mereka pikirkan adalah, apapun pekerjaannya dan berapapun penghasilannya yang penting bisa cukup untuk mempertahankan hidup.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Yuyun (2015: 90) yang menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat dalam mengatasi kemiskinan adalah budaya masyarakat, dimana kebiasaan serta sikap masyarakat yang belum memahami perubahan cenderung menyerah pada nasib, atau tidak mempunyai daya juang serta tidak mempunyai orientasi masa depan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi keluarga sejahtera dengan merujuk pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999: 33-34) yang menyatakan bahwa: (1) persepsi sebagai suatu cara pandang masyarakat sebagai suatu obyek berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran secara langsung maupun tidak langsung; (2) tingkat pendidikan masyarakat juga merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat, hal ini dapat dimengerti bahwa tingkat pendidikan secara tidak langsung menunjukan tingkat wawasan masyarakat terhadap dunia sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan isi Depdikbud diatas maka masyarakat miskin di kota Makassar memiliki persepsi dan cara pandang yang jauh berbeda dengan yang dipikirkan. Kondisi kemiskinan itu terjadi bukan hanya karena faktor pemerintah saja, melainkan masyarakat itu sendiri yang memiliki persepsi dan pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu yang ada disekitarnya, seperti kurang pemahaman terhadap pentingnya program-program kesejahteraan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah. Dilain sisi, masyarakat miskin tersebut selalu merasa nyama dengan pekerjaan yang dimiliki sekarang, hal tersebut menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap program ataupun pekerjaan lain.

3. Strategi yang Dilakukan untuk Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Maskyarakat Miskin

Masalah kemiskinan merupakan isu krusial di Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Melihat jumlah dan kecendurungannya, kemiskinan di negara ini bukan lagi merupakan kejadian sementara waktu. Melainkan sudah menjadi fenomena massal yang bersifat antar generasi. Berbagai strategi telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dengan menghabiskan dana sangatlah besar. Di daerah kota Makassar biaya penanggulangan kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya. Banyak program yang telah direncanakan dan dilakukan demi kesejahteraan sosial masyarakat oleh pemerintah daerah. Strategi dan perencanaannya dilakukan melalui diskusi terbuka dan disiminarkan di hotel. Namun sampai sekarang semua program tersebut belum bisa menjawab secara menyeluruh permasalahan yang ada.

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 20 menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk (1) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemanpuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; (2) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar; (3) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; (4) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Maka, pemerintah daerah memiliki kewajiban utama untuk menjamin dan

melindungi warganya melalui sistem hukum, serta menyediakan pelayanan sosial dasar guna memenuhi kebutuhan dasar setra hak-hak sosial penduduknya.

Upaya-upaya pemerintah dengan mengunakan sistem penyelenggaraan kesejahteran sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar setiap warga masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa pemerintah daerah kota Makassar telah melakukan banyak strategi dalam hal penanggulangan masalah kemiskinan di daerah ini. Seperti yang dilakukan oleh Dinas sosial bagian UKM yaitu mengendalikan anak-anak jalanan dan orang tua yang ada di sekitaran kota Makassar yang diarahkan ke panti asuhan dan panti jompo.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dengan merujuk pada Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3, menyatakan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan kecil; (4) mensinerjikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Maka diakui bahwa pemerintah kota Makassar telah membangun suatu strategi baru demi memenuhi hak-hak masyarakat.

Strategi yang dilakukan pemerintah sekarang adalah menetapkan program yang berdampak pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Dengan itu, maka pemerintah telah membangun rumah susun untuk keluarga miskin. Program tersebut telah dilakukan dan dirasakan langsung oleh sebagian

masyarakat miskin di kota Makassar. Program tersebut akan berkelanjutan dan akan dibangun di berapa titik rawan kemiskinan.

Program telah direncanakan dan dijalankan namun diperlukan pengawasan dan control yang baik demi keberlangsungan program yang baik dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melakukan sistem program, melakukan monitoring, bimbingan dan tindak lanjut serta evaluasi program. Kegiatan itu benar dan harus dilakukan, karena dalam menjalankan suatu program apabila tidak diawasi, dikontrol, serta tidak adanya bimbingan lanjut maka program tersebut tidak tahu akan diarahkan kemana.

Strategi lain yang tepat dilakukan dengan berpatokan pada teori Soleh (2014: 122) yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah model pembangunan diartikan sebagai serangkaian upaya peningkatan daya atau kemampuan mereka yang berada dalam posisi tidak berdaya, agar dengan tambahan kedayahan atau kemampuan tersebut dapat keluar dari belenggu kemiskinan. Hal ini dilakukan maka secara perlahan-lahan masyarakat miskin diberdayakan serta memiliki kemampuan secara mandiri dalam mengembangkan hidupnya.

Pemerintah kota Makassar telah menjalankan strategi pemberdayaan masyarakat dengan maksud memberdayakan masyarakat miskin di daerah ini. Berdasarkan hasil penelitian dengan berlandaskan pada teori yang kemukakan oleh Suharto (2014: 66) yang menyatakan bahwa konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan dengan tidakan aras atau matra pemberdayaan yaitu (1) Aras Mikro, dimana pemberdayaan dilakukan terhadap kliem secara

individu melalui bimbingan, konseling, *stree management, crisis intervension*. Dengan tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih kliem dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya; (2) Aras Mezzo, dimana pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok kliem. Pemberdayaan dilkakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap kliem agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya; (3) Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat dan menajemen konflik.

Strategi pemberdayaan dilakukan dengan maksud bahwa, secara jelas masyarakat akan selalu mendapat bimbingan dan pendampingan, pendidikan dan pelatihan secara rutin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk individu maupun kelompok masyarakat, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakt miskin yang tidak mampu, agar mereka bisa mandiri dan trampil dalam menghadapi persoalan hidup mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dengan merujuk pada teori-teori yang ada maka, strategi yang tepat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin adalah pembangunan rumah susun berpolakan asrama. Strategi ini merupakan perpaduan antara program-program pemerintah diantaranya rumah susun dan program pemberdayaan. Sistem ini dilakukan dengan maksud bahwa,

apabila masyarakat miskin tersebut diasramakan maka berdampak positif. Keunggulan dari rumah susun berpola asrama antara lain (1) mengurangi beban pengeluaran; (2) kemudahan dalam hal kontrol dan pengawasan; (3) kemudahan dalam mengakses bantuan dan pendataan; (4) pola hidup yang teratur; (5) penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan; (6) hubungan sosial kemasyarakatan terjalin baik dan lain sebagainya.

Pengurangan beban pengeluaran dalam rumah susun berpola asrama dimana biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat miskin untuk pembayaran air, tanah dan listrik selama ini dapat dikurangi dengan hanya membayar biaya operasional, yang relatif murah harganya. Selain itu, apabila masyarakat berada pada satu lokasi atau bangunan, maka pasti ada kemudahan dalam hal kontrol maupun pengawasan terhadap keseharian di lingkungan tersebut. Hal itu, dilakukan dengan maksud untuk mengurangi perilaku menyimpang yang sering terjadi di lingkungan yang bebas.

Keunggulan dari rumah susun pola asrama adalah kehidupan yang teratur dan berfokus dimana, setiap ektifitas dapat di kontrol oleh lingkungan. Selain itu, program-program pemerintah yang selama ini mengalami kesulitan karena faktor anggaran, dan keterjangkauaan yang luas akan dipermudah. Dimana petugas akan lebih mudah melakukan pendataan serta kemudahan dalam mengakses bantuan kepada masyarakat miskin tersebut.

Untuk menjawab masalah pemenuhan hak akan pendidikan, maka rumah susun berpola asrama menyediakan sarana pendidikan dan pelatihan. Masyarakat akan memperoleh pendidikan non formal dan pelatihan-pelatihan khusus demi

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh tiap individu tersebut. Kegiatan bimbingan, konseling dan pelatihan dilakukan pula dengan maksud untuk menjawab program-program pemberdayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Perlu disadari bahwa, kondisi lingkungan mempengaruhi pola pikir seseorang terhadap pentingnya pendidikan. Selain pelatihan diberikan kepada orang tua, yang paling penting adalah muncul kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak. Selain itu, hubungan sosial kemasyarakatan pula akan terjalin dengan baik di lingkungan asrama.

Rumah susun berpola asrama dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, baik perlengkapan fisik maupun tenaga professional. Semua perlengkapan, fasilitas maupun pengelolaan asrama tersebut dikelola langsung oleh pihak swasta. Hal tersebut untuk memungkinkan keamanan dan kenyamanan masyarakat setelah berada di lokasi tersebut. Fasilitas fisik yang dimaksudkan disini adalah penyediaan perlengkapan rumah tangga. Sedangkan tenaga professional yang disediakan adalah tenaga ahli yang di siapkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat penghuni asrama tersebut.

Strategi ini dikalukan bukan dengan maksud untuk secara langsung menghentikan status pekerjaan mereka sebagai buru kasar atau pengulung. Namun ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan pola ”Membangun Melalui Mendidik” (Ahok 13 Januari 2016). Pola tersebut dibangun pada setiap titik kantong kemiskinan dalam kota Makassar, agar masyarakat miskin juga menikmati hak mereka sebagai warga Negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan program kesejahteraan sosial oleh pemerintah kota Makassar belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut terbukti bahwa ada masyarakat yang belum mengenal program dan belum perna mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun.
2. Faktor determinan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang dihadapi pemerintah kota Makassar sehingga program kesejahteraan sosial tidak terlaksana dengan baik adalah dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain: faktor eksternal yakni (1) verifikasi data; (2) sistem sosialisasi dan informasi; (3) pengaruh politik dan (4) anggaran, serta faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat miskin itu sendiri yakni (1) pendidikan dan ; (2) pekerjaan.
3. Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pememenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di kota Makassar adalah melalui pembangunan rumah susun berpola asrama.

B. Saran-Saran

Dengan melihat pada hasil penelitian yang diperoleh, untuk memenuhi hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di kota Makassar, maka peneliti diberikan beberapa saran kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial antara lain:

1. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah mereta dan menyeluruh kepada semua masyarakat miskin yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.
2. Perlu adanya penambahan anggota TKSK untuk setiap kelurahan, sistem sosialisasi yang lebih terarah dan terfokus, menghindari interfensi politik dalam program dan kebijakan sosial, penambahan anggaran daerah dalam program kesejahteraan sosial serta pendidikan dan pelatihan khusus kepada masyarakat miskin.
3. Pembangunan rumah susun berpola asrama di setiap kantong-kantong kemiskinan, serta program-program yang telah direncanakan dan dilakukan perlu adanya sistem kontrol, pengawasan dan evaluasi secara baik dan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adi, Martini. 2003. *Kemiskinan Perkotaan (Makalah Pengantar ke Falsafah Sains*). Bandung: IPB Press.

Anwar, Oos, M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Arief, Nawawi, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kewajiban Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Perdana Madra Grup.

Bertens, K. 2005. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cassese, Antonio. 2005. *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Beruba.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Darmodiharjo, D. 1996. *Pancasila Suatu Organisasi Singkat*. Jakarta: Aries Lima.

Dawam, R. 2016. *Transformasi Kesejateraan Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*. Jakarta: LP3ES.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Pemberdayaan Nilai Budaya Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sejatra di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Yogyakarta: Depdikbud.

Komson, Ali. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Maftuchan, Mickael,B.H.& Victoria, F. (Eds.), 2016. *Transformasi Kesejahteraan Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*. Jakarta: LP3ES.

Muhtaj, Majda El. 2013. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mattulada. 1997. *Sketsa Pemikiran Tentang Kebudayaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

Miles, Matthew, A.& Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Notowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejatraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amzah.

Narwoko, Dwi, J. & Suyanto, Bagong. (Eds). 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.* Jakarta: Kencana.

Nasdian, Fredian, T. 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rukminto, Isbandi, A. 2015. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan).* Jakarta: Rajawali Pers.

Rustadi,. & Didi. 1999. Edisi I No. 4/1999. *Rakyat Rerlatih dalam Hubungannya dengan Pelaksanaan Tugas Polri*. Jakarta : Koorsahli Kapolri.

Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Srategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

_____, 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.

Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.

Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.

Sumodinigrat,. & Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Soerjono. S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahid, Nusron. 2014. *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia.

Wibisono, Yusuf,. & Lailatus, S. (Eds.), 2016. *Mimpi Anggaran untuk Masyarakat Miskin*; *Arah dan Strategi Pengelolaan APBN dari Era Orde Baru Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

B. Undang-undang

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. 2016. Jakarta: Visimedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sisial Nasional. Bandung: Alfabeta.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 2014. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 2010. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2010. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Penelitian Relevan

Nur, A. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus PKBM Inayah Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros).* Makassar: Program Pascasarjana UNM.

Yacob, S. 2011. *Petani Padi Sawah dan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa)*. Makassar: Program Pascasarjana: UNM.

Yunan, H. 2015. *Kemiskinan pada Masyarakat Tani (Studi Kasus di Kampung Dare Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*. Makassar: Program Pascasarjana UNM

Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrument Penelitian

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

NO	FOKUS MASALAH	DESKRIPSI FOKUS (INDIKATOR)	SUMBER
1	Penerapan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin.	1. Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) 3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 4. Kartu Indonesia Sehat (KIS) 5. Kartu Keluarga Pintar (KIP)	Wawancara dan Observasi
2	Faktor determinan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin.	1. Faktor Internal 2. Faktor Eksternal	Observasi, Wawancara Dokumentasi
3	Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin.	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;	Wawancara, Observasi

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Mayarakat Miskin di Kota Makassar

Fokus I : Upaya Penerapan Program Kesejahteraan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin di Kota Makassar.

A. Upaya penerapan program kesejahteraan sosial oleh Pemerintah (Informan1)

1. Menurut bapak/ibu Mengapa jumlah angka kemiskinan di kota Makassar selalu meningkat?
2. Program apa saja yang direncanakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat?
3. Bagaimana dengan program PKH, KIS, KIP, KKS dan RASKIN?
4. Apakah semua program tersebut telah terlaksana dengan baik?
5. Bagaimana proses pembahasan program kesejahteraan masyarakat miskin tersebut?
6. Apakah program yang dilaksanakan selama ini tetap sasaran?
7. Apa solusi bapak/ibu apabila program kesejahteraan rakyat tidak terealisasi dengan baik?
8. Melalui dinas atau lembaga mana saja realisasi program kesejahteraan sosial?
9. Kira-kira Berapa besar anggaran yang yang telah dialokasikan untuk program tersebut?
10. Bagaimana sistem pengganggarannya?
11. Apa rencana pemerintah jangka panjang kedepan dalam mensejahterakan keluarga tidak mampu?

B. Penerapan program berupa Pemberian Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial (Informan 2)

1. Menurut bapak/ibu Mengapa kemiskinan di kota Makassar selalu meningkat?
2. Program apa saja dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyat kurang mampu?

3. Bagaimana dengan program PKH, KIS, KIP, KKS dan RASKIN?
4. Apakah program tersebut telah berjalan dengan baik dan terlaknasa sesuai dengan yang diharapkan?
5. Jenis bantuan apa saja yang diberikan dari dinas sosial kepada masyarakat kurang mampu?
6. Apakah semua keluarga yang terdata dalam keluarga miskin telah menerima bantuan tersebut?
7. Dalam bentuk apa bantuan tersebut diberikan?
8. Sistem pemberian bantuan seperti apa, dan apakah diberikan secara berkelompok atau per kepala keluarga?
9. Rentang pemberian bantuan berapa kali dalam setahun?
10. Apakah ada program jangka panjang yang direncanakan oleh dinas social untuk mensejahterakan rakyat?
11. Apakah ada tim khusus yang menangani program bantuan sosial untuk keluarga miskin?

C. Bantuan yang diterimah oleh masyarakat setempat (Informan 3)

1. Apa program pemerintah kepada keluarga miskin yang bapak/ ibu ketahui?
2. Apakah bapak/ibu terdaftar sebagai penerima bantuan?
3. Apakah bapak/ibu tahu tentang program PKH, KIS, KIP, KKS dan RASKIN?
4. Apakah bapak/ibu memiliki kelima Kartu tersebut?
5. Apakah bapak/ibu sering mendapat bantuan lain dari pemerintah?
6. Bantuan dalam bentuk apa saja yang bapak/ibu terima?
7. Sudah berapa kali bantuan diberikan?
8. Bantuan tersebut bapak/ibu gunakan untuk apa?
9. Apakah bapak/ibu puas dengan jumlah bantuan yang diterima?
10. Apakah jenis bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan rumah tangga bapak/ibu?
11. Selain bantuan dari dinas sosial/ pemerintah, apakah bapak/ibu perna menerima bantuan dari pihak lain?
12. Dalam bentuk apa saja bantuan tersebut?
13. Apakah perna pemerintah selain bantuan sosial yang diberikan, ada bantuan yang dijanjikan kepada bapak ibu?
14. Apabila ada, maka janji tersebut apakah terselalisasi?

Fokus II : Faktor Determinan dalam Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin di Kota Makassar.

A. Foktor determinan pada pemerintah (Informan I)

1. Menurut bapak/ibu apakah program kesejahteraan sosial yang telah direncanakan dan dilaksanakan telah berjalan secara optimal?
2. Apakah program tersebut yang direncanakan semuanya dilaksanakan?
3. Apakah bapak/ibu perna melakukan kontrol dan Evaluasi terhadap program tersebut?
4. Tindak lanjut yang bapak/ibu lakukan setelah mengevaluasi program?
5. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan program-program kesejahteraan sosial?
6. Menurut bapak/ibu Apakah anggaran yang disediakan APBD telah disalurkan dengan baik tepat sasaran?
7. Berapa besar anggaran daerah untuk program kesejahteraan sosial?
8. Apakah anggaran daerah yang telah dianggarkan cukup untuk realisasi program?
9. Apakah ada kendala persoalan anggaran untuk program kesejahteraan sosial?
10. Apakah bapak/ibu perna/ sering sering turun dilokasi untuk kunjungan kebasisnya masyarakat kurang mampu (miskin)?
11. Pernakah bapak/ibu melaksanakan sosialisasi tentang program kesejahteraan sosial kepada masyarakat miskin penerima bantuan?
12. Apa kendala yang dihadapai pada saat memberikan informasi atau sosialisasi pada masyarakat?

B. Faktor Determinan pada Dinas Sosial (Informan II)

1. Apakah program kesejahteraan sosial semuanya dilaksanakan dengan baik?
2. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan program kesejahteraan sosial tersebut?
3. Apakah semua masyarakat miskin telah terdata dalam data PMKS?
4. Bagaimana sistem pendataan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial?
5. Apakah data penerima bantuan sosial sering di update (ditinjau kembali)?
6. Apakah ada kerja sama antara dinsos dengan pihak kelurahan dalam hal ini RT/RW untuk pendataan?
7. Kendala-kendala apa saja yang dialami selama proses pendataan?

8. Pernakah bapak/ibu melakukan sosialisasi program bantuan kepada masyarakat miskin penerima bantuan?
9. Kendala apa saya yang dialami selama melakukan sosialisasi?
10. Apakah ada kerja sama langsung antara dinas sosial dengan pemerintah daerah dalam hal program kesejahteraan sosial?
11. Dalam hal apa saja sistem kerja samanya?
12. Berapa besar anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk program kesejateraan sosial?
13. Bagaimana sistem penganggarannya?
14. Apakah dinas sosial melaksanakan kontrol dan evaluasi terhadap program bantuan sosial?
15. Apa tindak lanjut setelah program dievaluasi?

C. Faktor determinan oleh masyarakat (Informan III)

1. Apakah bapak/ibu telah terdata di RT/RW dan kantor Dinsos sebagai penerima bantuan?
2. Apakah ada tim yang sering mendata ke lokasi dalam hal bantuan?
3. Bagaimana system pendatan yang bapak/ibu ketahui?
4. Apakah bapak/ibu telah memiliki KTP/ KK?
5. Kendala apa saja sehingga tidak memiliki katru penduduk tersebut?
6. Apakah bapak/ibu melapor pihak berwenang ketika tidak mendapat bantuan atau mengalami kendala?
7. Apakah ada sosialisasi langsung baik dari dinas social maupun RT/RW tentang program kesejahteraan sosial?
8. Apakah bapak/ibu menghadiri sosialisasi tersebut?
9. Alasan apa sehingga bapak/ibu tidak mengahadiri sosialisasi?
10. Apabila bapak/ibu memiliki kartu kesejahteraan sosial maka apakah menerima bantuan secara rutin?
11. Bagaimana dengan pekerjaan yang bapak/ibu kerjakan sekarang?
12. Mengapa bapak ibu tidak ingin kerja pekerjaan lain selain pekerjaan sekarang?
13. Apakah perna pihak pemerintah daerah mengunjugi lokasi bapak/ibu?
14. Apabila bapak/ibu tidak perna mendapat bantuan maka melakukan pengaduan ke pemerintah?

Fokus III : Strategi yang Dilakukan untuk Menoptimalkan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin di Kota Makassar.

A. Strategi oleh Pemerintah (Informan I)

1. Program apa saja yang dilakukan untuk memberantaskan kemiskinan oleh pemerintah selama ini?
2. Bagaimana keefektifan dari program tersebut?
3. Apabila program tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka apa solusi yang dilakukan?
4. Strategi yang paling tepat menurut bapak/ibu dalam merealisasikan program kesejahteraan sosial?

B. Strategi oleh dinas sosial (Informan II)

1. Program apa saja yang dilakukan untuk memberantaskan kemiskinan oleh pemerintah selama ini?
2. Bagaimana keefektifan dari program tersebut?
3. Apabila program tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka apa solusi yang dilakukan?
4. Strategi yang paling tepat menurut bapak/ibu dalam merealisasikan program kesejahteraan sosial?

C. Strategi oleh masyarakat (Informan III)

1. Menurut bapak/ibu apabila pemerintah belum menberikan bantuan maka apa yang ada dilakukan?
2. Apa yang anda inginkan dari pemerintah?
3. Apabila bantuan tidak sampai atau tidak sepenunya diberikan maka apa tanggapan anda?
4. Solusi yang anda pikirkan agar bisa memperoleh perhatian dan bantuan dari pemerintah?
5. Strategi yang tepat menurut bapak/ibu terhadap pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial?

Lampiran 3. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI 1

(Kesejahteraan Secara Fisik)

Hari/ Tgl Observasi :

Lokasi :

Nama Kepala Keluarga :

No	Aspek Yang di Nilai	Keterangan		KET
		Ada	Tidak	
1.	Bangunan Rumah a. Atap Seng b. Lantai Semen c. Dinding Batu d. Wc/ Kamar Mandi			
2.	Isi Bangunan a. Kursi b. Meja c. Lemari			
3.	Fasilitas Dapur a. Kompor b. Rice cook/dispenser			
4.	Sumber Air a. PDAM b. Sumur			
5.	Listrik/Sarana Penerangan			

PEDOMAN OBESERVASI 2

(Kesejahteraan Secara Non Fisik)

Hari/ Tgl :

Tempat :

Nama Kepala Keluarga :

No	Aspek Yang di Nilai	Keterangan	
		Baik	Tidak
1.	Hubungan antara anggota keluarga		
2.	Kehidupan bertetangga		
3.	Kemudahan dalam mengakses pendidikan		
4.	Penerapan musyawarah mufakat dalam keluarga		
5.	Kondisi Keamanan Lingkungan sekitar		
6.	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan/gotong royong		
7	Tekun terhadap Pekerjaan yang dimiliki		

Lampiran 4. Dokumentasi, Wawancara dan Observasi (Foto Galeri)

Pelaksanaan wawancara dengan

Bapak. Baharuddin Ghalib, SE. MM

(Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial- Dinsos)

Pelaksanaan wawancara dengan

Nadira, SP

(Tenaga Staf Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial- Dinsos)

Pelaksanaan wawancara dengan

Bapak. Mario David Pn, S. Sos. MM

(Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D Bagian Kesra)

Pelaksanaan wawancara dengan

Bapak. La Heru, S. Sos. MSi

(Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial- Dinsos)

Pelaksanaan wawancara dengan

Bapak Hamsi Azis, S.Sos

(Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan-TKSK- Dinsos)

Pelaksanaan wawancara dengan

Ibu. Hadaya

(Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat/Kesra Kel. Tamangapa)

Pelaksanaan wawancara dengan

Bapak. Abdulrahman Dynai

(Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Tamangapa)

Pelaksanaan wawancara dengan

Bapak. Muhamad Paris

(Ketua RW 04 Kelurahan Tamangapa)

Wawancara dengan

Bapak Domensen Syki

(Masyarakat Miskin)

Wawancara dengan

Ibu Ace

(Masyarakat Miskin)

Wawancara dengan

Bapak Muhamad Ali

(Masyarakat Miskin)

Wawancara dengan

Bapak Disaro

(Masyarakat Miskin)

Dokumentasi Bapak Disaro bersama istri

Wawancara dengan

Ibu Masita

(Masyarakat Miskin)

wawancara dengan

ibu Marni

(Masyarakat Miskin)

Wawancara dengan

Ibu Dnai

(Masyarakat Miskin)

Dokumentasi observasi partisipan

Bermalam di rumah masyarakat

Dokumentasi observasi partisipan

Makan malam bersama masyarakat

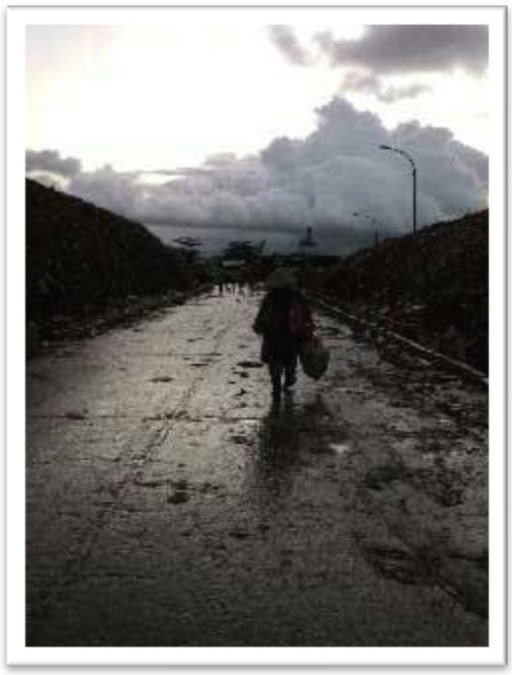

Dokumentasi observasi partisipan

Aktifitas pengulung di pagi hari

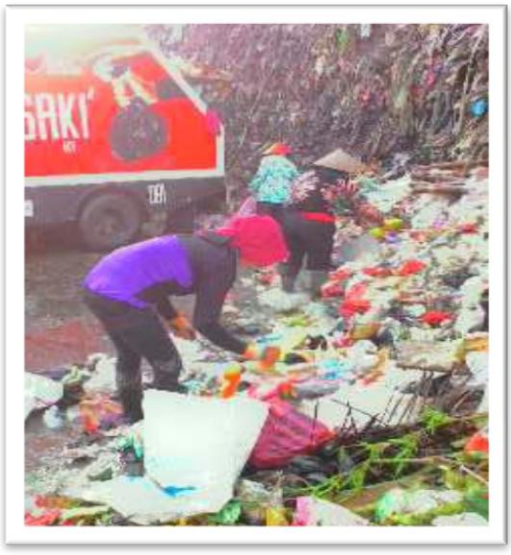

Dokumentasi aktifitas Payabo saat mengulung

Dokumentasi bersama payabo setelah ngulung

Dokumentasi ibu Mira sebelum pergi ngulung

Dokumentasi bersama ibu Siti sementara mengulung

Pelaksanaan Wawancara dengan

Ibu Naharia

(Masyarakat Miskin)

Dokumentasi obvervasi partisipan

Makan dan ceritra bersama masyarakat di lokasi TPA

Dokumentasi bersama masyarakat di lokasi TPA

Dokumentasi bersama masyarakat

sebelum pergi mulung

Dokumentasi bantu mengulung

Dokumentasi kondisi fisik perumahan penduduk miskin

Dokumentasi dinding rumah masyarakat miskin

Dokumentasi lantai rumah masyarakat miskin

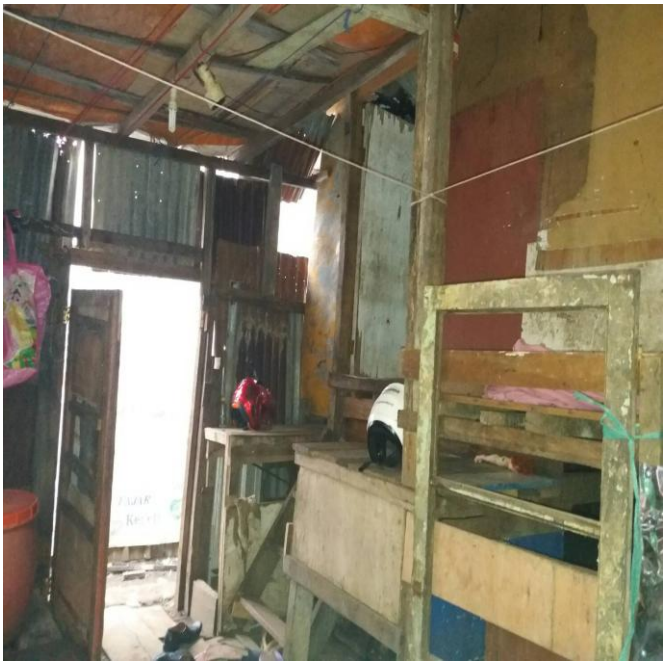

Dokumentasi kondisi fisik rumah masyarakat miskin

Lampiran 5. Riwayat Hidup

Riwayat Hidup

Theresia Ngutra, lahir di Waur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tanggal, 28 Desember 1984. Putra ketiga dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Nikolaus Ngutra dan Ibu Huberta Ngutra/Samderubun.

Pendidikan:

Panulis menyelesaikan pendidikan formal pada SD Nasional Katolik Waur II Maluku Tenggara Tahun 1996, SMP Yosudarso Waur Maluku Tenggara Tahun1999, SMA Negeri 1 Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2002, dan melanjutkan Pendidikan S1 (Strata Satu) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraaan Universitas Cenderawasi Jayapura Tahun 2003-2007. Pendidikan Magister pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Tahun 2015.

Penulis diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara sejak Tahun 2008, pengangkatan pertama ditempatkan sebagai guru pada SMP Negeri 1 Kei Kecil dan pada tahun 2013 dimutasikan ke SMP Negeri 1 Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara sampai sekarang.